

SKRIPSI

**BUDAYA BERDESA DALAM MEMBANGUN KALURAHAN
DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

JOHANES LANGGA

NIM: 18520201

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN JUDUL

**BUDAYA BERDESA DALAM MEMBANGUN KALURAHAN
DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Serjana Jenjang Pendidikan Stara Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juli 2022
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

NAMA	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing		
<u>Drs Suharyanto, M.M</u> Penguji samping I		
<u>Dra. Tri Daya Rini, M.Si</u> Penguji Samping II		

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johanes Langga

NIM : 18520201

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“BUDAYA BERDESA DALAM MEMBANGUN KALURAHAN DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, 1 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Johanes langga

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas berkat dan kasihnya, Skripsi dengan judul: BUDAYA BERDESA DALAM MEMBANGUN KALURAHAN DONOHARJO, Penelitian Kualitatif Eksplanatif di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak pencerahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai selesainya skripsi ini. Dibimbing kurang lebih satu tahun berlalu merupakan sebuah kehormatan yang memberikan banyak hal bagi penulis: Keberanian membangun argumen, pemetaan perspektif, serta membimbing penulis dalam memastikan pintu masuk dan pintu keluar. Dan, pengalaman yang tidak kalah penting adalah mendudukan ilmu yang ditempuh pada tempatnya serta proses memaknai setiap kata, tindakan dan perbuatan yang diambil.
2. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” yang telah membekali banyak pengetahuan dan menjadi teman diskusi penulis selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Donoharjo yang telah menjadi teman diskusi selama penulis magang dan penelitian.
4. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan banyak dukungan dan menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta. Jika saya harus mengulang kembali dari awal seluruh rangkaian proses perkuliahan ini, saya akan mengatakan dan bersaksi, bahwa tidak pernah menyesal telah menempuh

pendidikan di Kampus yang tercinta ini. APMD mengajarkan banyak hal, termasuk memahami hajat hidup orang banyak secara utuh. Penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan skripsi, tidak luput dari kekurangan, kesulitan, hambatan maupun rintangan, yang tentu pada skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak, Ibu Dosen beserta semua pihak atas segala bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah wacana pemikiran jalan perubahan bagi pihak yang berminat pada penelitian di bidang ini.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Penulis

Johanes Langga

MOTTO

“Kejarlah keunggulan maka kesuksesan akan menyusulurimu”

(Langga Roodriguez)

Jalan Pemimpin bukanlah jalan yang mudah. Memimpin adalah menderita.

(Kasman Singodimedjo)

Untuk menjadi juara yang hebat, kamu harus percaya bahwa kamu adalah yang terbaik. Jika tidak, bersikaplah seolah-olah kamu yang terbaik.

(Muhammad Ali)

jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan, tetap tersenyum walau tidak mudah, dan jangan lupa bersyukur di setiap keadaan.

(Merry Riana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Di tempat kelahiran saya, menempuh pendidikan sampai meraih gelar sarjana adalah sebuah keberhasilan yang sangat disyukuri. Secara pribadi, di tengah keterbatasan ekonomi dan ketertinggalan pengetahuan keluarga, capaian ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan besar bagi saya dan keluarga. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Keluarga

Teruntuk mama Magdalena Pali,(almaruma) yang selalu memberikan doa dan dukungan setiap aku ada di samping mama, yang selalu mendoakan saya untuk menjadi orang besar, yang selalu memberi nasehat suka maupun duka tentang kehidupan, yang selalu membelahku dari hinaan orang, yang selalu memberikan arti kehidupan bagaimana cara membalas hinaan orang dengan tersenyum dan diam. Teruntuk saudariku Florida lega yang rela mati jadi kuli kayu di tanah orang yang membiaya perkuliahan sampai akhir, yang selalu memberih nasehat,dan memberi pesan bahwa “ingat” kata mama. Untuk, Urbanus Ngilli, merry pure, Clara Lanu,Faldi Sigo,yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Terkhusus mama tuti,bapak Regi,patris pio, febby Wea yang selalu menderaskan doanya untuk saya, yang selalu, menjadi ayah, ibu saudari dan saudaraku selama hidup.kalian lah yang terbaik.

2.Organiasi memberikan pelajaran berharga bagi saya

Rekan-rekan UKM- Khatolik,UKM, Volly. GMNI APMD dan Keluarga Besar Gabungan Mahasiswa Rokatenda, yang sudah menjadi rumah produktif bagi saya, belajar, berdinamika, dan membangun komukasi yang baik. Yang selalu memerikan sumbangsi pikiran,tenaga untuk kebaikan bersama.

3. Para sahabat teman dan senior

Muhamad isak,Aslam Nur yang selalu memberikan pencerahan, memberih buku, memberih nasehat, yang selalu menyumbangkan pikiran maupun nasehat tentang cinta dan politik, Roy susan, Anastia wanty, yang selalu jadi partner di organiasi GMNI,bang sakro,stefani rue, cece bella, arjuna, angel, eva, bang felix, dan rena-rekan ukm khatolik yang selalu menjadi palayan sejati. Herka kadalolor, lewun mengajarkan pada saya demokrasi dalam persahabatan, perlawanan terhadap penindasan, kepedulian menanggung beban bersama, serta semangat dalam mengemban amanah dan menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk kebaikan bersama.teman-teman ukm volly, detsy,angel silaelei, lenda, ijun, wira, dan yang sudah menjadi sahabat sejati. teman seperuangan skripsi, Cisci pratiwi,indra, Eti, Tino,Epi yang selalu memberikan arahan bagaimana menulis yang baik,selalu memberi motivasi dan memberi semangat selama penyusunan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	15
C. Rumusan masalah.....	15
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
E. <i>Literature Review</i>	16
F. Kerangka Konsep	24
1. Budaya.....	24
2. Kearifan lokal.....	29
3. Pembangunan Desa	32
4. Budaya Berdesa.....	34
5. Partisipasi Dalam Pembangunan.....	35
6. Pemerintahan Desa.....	37
G. Metode Penelitian.....	43
BAB II DESKRIPSI KALURAHAN DONOHARJO.....	48
A. Sejarah Kalurahan Donoharjo	48
B. Visi dan Misi	48
1. Visi	48
2. Misi	49
C. Geografis Kalurahan Donoharjo	50
D. Luas Wilayah dan Peruntukannya.....	52

E. Demografi	53
1. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia.....	53
2. Jumlah Kartu Keluarga atau KK	54
3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan	55
4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
F. Sarana dan Prasarana.....	57
1. Sarana Pendidikan	57
2. Sarana Kesehatan	58
G. Kondisi Masyarakat Kalurahan Donoharjo.....	61
1. Kondisi Sosial	61
2. Kondisi Ekonomi	62
3. Kondisi Budaya.....	64
4. Wisata Budaya	65
H. Keuangan Desa.....	67
1. APBDesa Kalurahan Donoharjo Tahun Anggaran 2019	68
2. APBDesa Kalurahan Donoharjo Tahun Anggaran 2020	70
3. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kalurahan Donoharjo	73
I. Penerimaan Bantuan Langsung Tunai	81
BAB III BUDAYA BERDESA DI KELURAHAN DONOHARJO	83
A. Budaya Berdesa Dalam Bentuk Kearifan Lokal Untuk Membangun Desa.....	83
B. Budaya Berdesa Dalam Perwujudan Gotong Royong sebagai Modal Sosial.....	88
C. Budaya Berdesa Dan Partisipasi Dalam Proses Pembangunan	92
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Narasumber/ <i>Informan</i> Penelitian	46
Tabel II.1	Luas Wilayah Desa Donoharjo	52
Tabel II.2	Jumlah Pendudukan berdasarkan Usia	53
Tabel II.3	Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan	55
Tabel II.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel II.5	Fasilitas Pendidikan.....	57
Tabel II.6	Fasilitas kesehatan.....	58
Tabel II.7	Nama-nama Kepala Desa dan Perangkat Kalurahan Donoharjo ..	60
Tabel II.8	Nama-nama Kepala Dukuh di Kelurahan Donoharjo	61
Tabel II.9	Mata Pencaharian Penduduk di Kalurahan Donoharjo	64
Tabel II.10	Rencana dan Realisasi APBDesa Kalurahan Donoharjo Tahun Anggaran 2019	68
Tabel II.11	Rencana dan Realisasi APBDesa Kalurahan Donoharjo Tahun Anggara 2020	71
Tabel II.12	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Donoharjo	74
Tabel II.13	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Donoharjo	77

ABSTRACT

This study attempts to describe and explain why something can happen in village culture in the Donoharjo Sub-district, Kapanewon Ngaglik, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. This location is interesting to study because Kalurahan Donoharjo is motivated by various cultures, social, life, and community participation in government administration. At the same time answering the question of how rural culture contributes in building the Donoharjo village.

This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation, discussions with village officials, without any visible research. Then the researcher summarizes the information that has been obtained, narrates, interprets, and constructs the information and facts found.

The results of this study revealed that village culture in the Donoharjo district is very worrying where, the local wisdom that exists there is starting to lose its identity. Such as arts and traditional dances and even social life starting from mutual cooperation and community participation. This phenomenon is not realized by the Donoharjo village causing friction in the social life of the community and loss of trust in the kalurahan so that the legitimacy and authority of the kalurahan are no longer useful. Even though the village of Donoharjo has so many cultures that are produced in social life and is now starting to lose its identity.

Keywords: culture, village, mutual cooperation and participation.

INTISARI

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa terjadi dalam budaya berdesa di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini menarik untuk diteliti karena Kalurahan Donoharjo dilatarbelakangi oleh berbagai budaya, kehidupan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana kontribusi budaya berdesa dalam membangun Kalurahan Donoharjo.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi seperti dokumen penting desa, diskusi dengan para perangkat kalurahan tanpa terlihat penelitian. Kemudian peneliti merangkum informasi yang telah didapatkan, menarasikan, menginterpretasi dan mengkonstruksi informasi dan fakta yang ditemui.

Hasil penelitian ini terungkap bahwa budaya berdesa yang ada di Kalurahan Donoharjo sangat mengkhawatirkan dimana kearifan lokal yang ada di sana mulai kehilangan identitasnya. Seperti kesenian dan tarian adat bahkan kehidupan sosial, mulai dari gotong-royong dan partisipasi masyarakat. Fenomena tersebut tidak disadari Kalurahan Donoharjo menyebabkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat dan kehilangan kepercayaan kepada kalurahan sehingga nilai legitimasi dan otoritas kalurahan tidak lagi bermanfaat. Padahal Kalurahan Donoharjo mempunyai begitu banyak budaya yang dihasilkan dalam kehidupan sosial dan kini mulai kehilangan identitas dirinya.

Kata kunci : *Budaya, Berdesa, Gotong-royong dan Partisipasi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah menjadi hal yang pokok dalam kehidupannya.

Kebudayaan dan pembangunan bukanlah dua hal yang bertolak belakang, melainkan dua hal yang dapat bekerja secara berdampingan dalam keselarasan dan keharmonisan sosial. Urgensi suatu budaya dapat dilihat dari fungsinya yang mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia. Fungsi budaya yakni mempersatukan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam

masyarakat salah satunya melalui proses pembangunan. Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental masyarakat yang menentukan keberhasilan pembangunan di desa. Apabila karakter dan mental masyarakat khususnya masyarakat desa yang cenderung tertutup/isolasi diri pihak luar tentu tujuan pembangunan sulit terlaksana. Disisi lain pembangunan multisektor lainnya juga membutuhkan peran kebudayaan untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan. Seringkali timbul permasalahan, ketidakberhasilan sasaran program yang dijalankan di daerah tersebut disebabkan kurangnya dukungan dan faktor budaya masyarakat tertentu.

Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup (Kemdikbud, 2016). Sedangkan menurut Akhmar dalam (Dhoki, dkk 2016), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam bertingkah-laku sehari-hari suatu masyarakat.

Kearifan lokal merupakan “aset spiritual” atau kebijakan hidup yang mengajarkan masyarakat bagaimana harus bersikap. Oleh karenanya

meskipun kearifan lokal merupakan hasil produk budaya masa lalu namun patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup bangsa Indonesia. Kearifan lokal bersifat lokal artinya kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda antar wilayah dan antar suku. Namun demikian ada kearifan lokal yang tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya tertentu namun dapat pula bersifat lintas budaya sehingga membentuk kearifan lokal yang bersifat nasional. Satu contoh adalah kearifan lokal yang mengajarkan untuk gotong royong yang dapat ditemui hampir di semua budaya/suku di seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia, kearifan lokal merupakan filosofi dan pandangan hidup yang diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam tata nilai sosial ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya. Misalnya kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam menghasilkan pendopo dalam arsitektur tradisional Jawa. Pendopo yang terletak di bagian depan sebuah rumah memiliki konsep ruang terbuka yang menjamin ventilasi dan sirkulasi udara yang lancar tanpa penyejuk udara. Pendopo juga berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi dengan keluarga, kerabat maupun tetangga. Sehingga pendopo memiliki makna lain yaitu untuk mengaktualisasi salah satu bentuk kerukunan antara pemilik rumah dengan kerabat dan masyarakat di sekitarnya.

Kearifan lokal dalam kesehatan terwujud dalam bentuk obat dan cara pengobatan tradisional, misalnya penggunaan kencur untuk mengobati sakit

batuk dan daun jambu biji untuk mengobati sakit diare. Kearifan lokal biasanya diajarkan secara turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi diwujudkan dalam bentuk benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*), misalnya bahasa, sastra, kesenian, upacara, adat istiadat dan sebagainya. Selain itu kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama yang bersifat menjaga dan melestarikan alam. Sebagai contoh di Papua terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku), Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan hal ini maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati. Contoh lain, di Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan *celako kumali*.

Kelestarian lingkungan di wilayah ini dapat terwujud dari kuatnya keyakinan ini yang mengajarkan tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak. Seringkali kearifan lokal menjadi dasar dalam mengambil kebijakan pada tingkat lokal di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Konsep konservasi tradisional pada suku Dayak Kenyah di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu tradisi tana' ulen yang menganggap kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Kemudian pada masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan di Kampung Dukuh, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dikenal upacara tradisional,

mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan dilakukan dengan hati-hati dimana tidak diperbolehkan untuk eksploitasi berlebih kecuali atas izin sesepuh adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam sistem sosial masyarakat ini sangatlah penting untuk dihayati, dipraktekkan dan diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya guna membentuk dan menuntun pola perilaku masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Pembangunan yang tidak didasarkan atas kebijakan hidup dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan bangsa.

Kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Budaya atau kebudayaan mengandung pengertian yang sangat luas dan mengandung pemahaman perasaan suatu bangsa yang sangat kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan pembawaan lain yang diperoleh dari anggota masyarakat dalam Dhoki dkk (2016). Kebudayaan memiliki 3 wujud yaitu wujud sistem budaya, wujud sistem sosial dan wujud kebudayaan fisik. Indonesia kaya akan berbagai nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang secara turun temurun. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembentukan jati diri dan karakter bangsa. Namun dalam kurun waktu terakhir dapat dirasakan telah terjadi degradasi moralitas sosial di Indonesia. Terbukti hampir setiap hari di media massa seperti televisi dan surat kabar banyak memberitakan terjadinya aksi kriminalitas, tawuran, dan tindak kekerasan. Seolah-olah kekerasan atau anarkisme telah menjadi bagian

hidup keseharian bangsa Indonesia. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adab kesopanan dan nilai moral kemanusiaan.

Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Arus globalisasi yang deras menawarkan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta bergaya hidup konsumtif terbukti secara perlahan lahan telah mereduksi nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal. Bangsa Indonesia memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kearifan lokal mengajarkan untuk ramah tamah, gotong royong, sopan, rela berkorban, memiliki etos kerja yang baik, saling menghormati, dan toleransi. Namun nampaknya kearifan lokal yang ada tersebut seolah kurang memiliki peran dan mulai pudar kekuatannya sebagai pedoman kebijakan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya agar kearifan lokal tetap dapat hidup dan berkembang serta mengikuti arus perkembangan global.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi. Dalam pelaksanaan pemerintahan, setiap daerah dibebaskan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Dalam BAB V Pasal 18 Poin ke 2 tentang Pemerintah daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan UUD 45. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah dapat leluasa dalam melakukan terobosan-terobosan guna membangun daerah tersebut, seperti halnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa (dalam Sutoro Eko 2017) Kepala Desa

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No.114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa yang berbunyi perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Pelibatan seluruh masyarakat desa menjadi sumber informasi dalam perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah dusun atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Adapun unsur masyarakat (Permendagri BAB II Pasal 15) yang dimaksud antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan kelompok masyarakat miskin (PPPD, 2016:179) Dalam melaksanakan pembangunan desa yang diinginkan visi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat haruslah sejalan.

Kepala Desa menjalankan pemerintahan berdasarkan fungsi dan wewenangnya dan BPD menjalankan fungsi sebagai perwakilan masyarakat dengan sebaik mungkin, ketiga elemen tersebut haruslah menjalankan tugas dan fungsi masing. Struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh

karena itu, masyarakat mempunyai kelembagaan yang saling terkait dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa dimana setiap unsur menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai kebutuhan dalam hal ini pembangunan desa, seperti yang dikatakan oleh Parsons (2014:408), yang menyatakan bahwa suatu fungsi adalah suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sistem.

Berdasarkan diskusi di atas Tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat Desa belakangan ini adalah kemampuan dalam menjaga, melestarikan, dan mewariskan kearifan-kearifan lokal dalam upaya menjaga arus globalisasi dan dominasi negara atas nama modernisasi yang bersifat birokratis dan administratif. Pewarisan nilai kearifan lokal dimaksudkan agar generasi muda dan masyarakat desa dapat memproteksi diri dari pengaruh negatif modernisasi yang merambat sampai pada struktur pemerintahan akibat globalisasi. Globalisasi yang dicirikan oleh perpindahan orang, pengaruh teknologi, pengaruh media informasi, aliran uang dari negara kaya ke negara miskin, dan pengaruh ideologi, sangat dirasakan masyarakat desa. Sentuhan budaya global menyebabkan terjadinya perubahan sosial-budaya dan tataran nilai pada masyarakat desa. Modernisasi dan globalisasi telah memperkenalkan nilai-nilai baru dalam lingkungan tradisi tradisi masyarakat desa. Sistem budaya lokal dengan kearifan lokalnya yang selama ini digunakan sebagai acuan pembentukan karakter oleh masyarakat desa tidak jarang mengalami perubahan karena pengaruh budaya global, yang dapat

menimbulkan keresahan psikologis dan krisis identitas pada sebagian masyarakat desa.

Kegamangan nilai juga dialami masyarakat desa modern karena lebih mengutamakan kemampuan akal dibandingkan dengan nilai-nilai transendental serta tunduk pada paham individualisme, materialisme, dan kapitalisme yang berakibat terjadinya penyimpangan nilai moral yang tercermin dalam corak, gaya, dan pola hidup masyarakat. Fenomena menguatnya corak dan gaya hidup hedonis cukup mengkhawatirkan bagi pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena arus globalisasi tidak dapat dihindari, maka dalam pewarisan nilai-nilai budaya berdesa atau kearifan-kearifan lokal dengan serapan nilai global disarankan menggunakan teori teori pohon, teori kristal, dan teori sangkar burung. Hal ini menjadi gurita sampai di level struktur pemerintahan Desa. sebagian besar kepala desa bukanlah pemimpin masyarakat yang berakar dan legitimate dimata masyarakat meski secara fisik dekat dengan rakyat, melainkan menjadi bagian dari birokrasi yang mempunyai segudang tugas kenegaraan. Menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, serta melakukan kontrol dan memobilisasi warga desa. Jika pemerintah desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka kepala desa merupakan personifikasi pemerintahan desa.

Pemerintah melakukan program pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan tersebut berlandaskan pada pengertian sebagai pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan diartikan

sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk juga percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan. Petani juga sebagai makhluk sosial ingin mempunyai taraf hidup yang sesuai dengan hidupnya. Peningkatan taraf hidup tersebut diperoleh petani dengan cara meningkatkan pendapatannya. Untuk memperoleh pendapatan yang tinggi mereka melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan sebagai petani. Petani melaksanakan kegiatannya sebagai guru tani juga mempunyai peran lain yakni sebagai pengelola. Seperti didalamnya tercakup pengambilan keputusan atau pengambilan alternatif, keputusan tersebut misalnya menentukan bagaimana membagi waktu antara berbagai tugas (*food and agriculture organization*).

Dalam hal petani maupun menanam padi selalu mengalami kekeringan lahan air irigasi tidak lancar jalannya sehingga petani kekurangan air sehingga petani mengambil air tanah menggunakan pompanisasi dengan biaya sekitar 15 kg gabah kering panen/rante jika dibandingkan dengan air irigasi biaya sebesar 3 kg gabah kering panen/rante. Disamping itu tanah mereka kurang subur dan hama penyakit merajalela di lahan mereka serta panen mereka sangat tidak produktif. Doa turun tanam adalah salah satu jenis ritual atau upacara minta hujan, yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani, masyarakat desa masih percaya melalui doa turun tanam, makan akan segera turun hujan, namun dibalik itu menanam pagi mengandung harapan menanam padi bisa bertumbuh

subur, tidak diserang hama/penyakit dan menghasilkan panen melimpah (dalam Zulkani, 2012).

Disisi lain, kemiskinan juga bagian dari budaya, misalnya di negara india kemiskinan dianggap hal yang lumrah karena perbedaan kasta dan mereka tidak menganggap itu adalah karma tapi sistem yang diterapkan di negara tersebut dan tidak menyalahkan pihak lain. Kasta Vaisha dan Sudra adalah kasta terendah yang ada di India yang terdiri dari perdagangan komersial, petani, nelayan dan pelayan. Hal ini menjadi terbiasa dan terjadi berabad-abad sehingga menjadi budaya. Senada dengan itu, Perbedaan kasta ini juga berlaku di Indonesia misalnya orang berlomba-lomba untuk menjadi bagian anggota kerajaan dan bahkan menjadi anak sultan. Contohnya di Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan, melakukan pemilihan anggota prajurit Kraton Jogja. Pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis yang melibatkan masyarakat awam, hal ini menjadi aneh ketika menjadi anggota prajurit minimal gaji yang didapat -75% dari hasil yang didapatkan sebelum menjadi anggota prajurit. Di sisi lain masyarakat berbondong-bondong mengikuti pemilihan tersebut. Mereka menganggap status lebih penting dari pada nominal uang yang melekat pada dirinya, mereka sangat bangga menjadi bagian anggota tersebut.

Kalurahan Donoharjo merupakan Desa yang dilatarbelakangi berbagai agama, budaya dan mata pencaharian. Walaupun warga Donoharjo mayoritas muslim tetapi mereka hidup saling berdampingan dan saling menghormati satu sama lain. Kemayoran keyakinan bukan menjadi tolak ukur untuk

memajukan suatu perubahan terhadap desa tersebut, tetapi keakraban dan saling menghormati perbedaan itulah yang menjadi paradigma baru dalam menata sebuah perubahan yang berorientasi pada masa depan kata salah satu warga. Mayoritas warga Donoharjo mata pencaharian sebagai petani peternak, dan perikanan ,yang Terdapat pada struktur pemerintahan Desa Donoharjo. Yang menjadi unik dan ciri khas Desa Donoharjo adalah kelompok-kelompok tersebut bukan dibentuk melalui (Musrembang) tetapi dibentuk oleh masyarakat itu sendiri atas dasar punya misi yang sama yaitu ingin membantu perekonomian rumah tangga. Donoharjo mempunyai Wisata Embung dan itu dikelola oleh BUMDesa, pengelolaan embung ini merupakan program prioritas yang sedang dijalankan oleh aparat desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa. Potensi wisata ini belum tergarap dengan optimal. Pembentukan kelembagaan BUMDesa dimulai dengan pelaksanaan diskusi dengan stakeholders terkait dengan pengelolaan embung sampai pada penyusunan program kerja.

Salah satu kearifan yang paling menonjol adalah pada saat proses pernikahan dan pelayatan orang meninggal, dimana ketika ada pengumuman di Gereja atau di Mesjid masyarakat berbondong-bondong mempersiapkan diri membantu masyarakat lain misalnya pada saat pernikahan khusus bapak-bapak dan anak muda mempersiapkan tenda jadi, kursi dan lain-lain, sedangkan ibu-ibu mempersiapkan makanan dan penerimaan tamu. Serupa dengan dalam hal pelayanan orang meninggal, dimana masyarakat

sekitar rumah duka akan berhenti berkegiatan sebagai tanda penghormatan dan sebagian masyarakat mempersiapkan fasilitas yang diperlukan dalam proses pelayanan. Demikian juga terjadi pada struktur pemerintahan dimana masyarakat Kalurahan Donoharjo bekerja kolektif kolegial terkait dengan hal-hal pemerintahan misalnya renovasi dan rehabilitasi kantor desa dimana masyarakat menyerahkan sebagian tenaga dan isi dompet untuk desa, dalam wujud iuran perorangan dan mengumpulkan material (batu dan pasir) di sela-sela waktu kegiatan. Hal ini dilakukan tanpa intimidasi dan intervensi pihak pemerintahan desa. Masyarakat donoharjo melakukannya dengan swadaya dan tanpa digaji, ini berlaku juga pada fasilitas umum misalnya sekolah, dan puskesmas, Mesjid dan Gereja.

Kondisi tersebut hanya berlaku pada zaman dulu sebelum pandemi dan sesudah pandemi keadaan tersebut tidak lagi begitu harmonis, misalnya Kalurahan Donoharjo mempunyai Kesenian lokal dalam bentuk sistem nilai seperti Jatilan, Nyandrat, wewet Ketoprak, dan lain-lain adalah semua jenis tarian adat yang terdapat di Donoharjo tetapi kearifan tersebut tidak semua berjalan dengan baik. Hal ini dikarekan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga kearifan lokal itu dianggap ketinggalan zaman. Bukan sepenuhnya akibat dari perkembangan zaman tetapi ini juga masih dalam suasana pandemi Covid 19 yang menghentikan semua jenis aktivitas, menyebabkan partisipasi dan gotong-royong masyarakat ikut terkikis. faktor yang menghambat partisipasi masyarakat rendah adalah masih dalam suasana pandemi dan masyarakat Donoharjo terlanjur nyaman pada zona yang mereka

punya sehingga produktivitas, kreativitas masyarakat kurang berkembang. Fenomena tersebut merambat sampai pada kontribusi budaya berdesa dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kalurahan Donoharjo, misalnya gotong-royong dalam pembuatan talud, jalur irigasi, jalan, dan lain-lain. Partisipasi masyarakat dalam Musdes dan Musrembang begitu rendah sehingga menjalankan roda pembangunan yang ada di Kalurahan Dohoharjo juga ikut terhambat.

B. Fokus penelitian

1. Budaya berdesa dalam bentuk kearifan lokal untuk membangun desa.
2. Budaya berdesa dalam gotong royong sebagai modal sosial.
3. Budaya berdesa dan partisipasi dalam proses pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di latar belakang di atas maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Budaya Berdesa Dalam Membangun Kelurahan Donoharjo, Kec. Ngaglik kab. Sleman, Yogyakarta.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini :

Untuk mendeskripsikan budaya berdesa dalam pembangunan.

Manfaat penelitian ini:

1. Manfaat akademis untuk memberikan evaluasi dan catatan kritis atas studi studi tentang budaya berdesa di ruang akademik.

2. Manfaat praktis penelitian ini bisa memberikan cara pandang baru bagaimana kehidupan yang arif sangat berpengaruh pada proses pembangunan, pembentukan karakter pemimpin, pencapaian klasmen papan atas moralitas.
3. Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagaimana budaya dan kearifan lokal sangat berpengaruh dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Literature Review

Pada *literature review* penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan budaya berdesa.

1. Penelitian yang dilakukan (dalam Mohammad Dokhi dkk, tentang Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam budaya masyarakat tercermin dalam keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kunjungan ke tempat-tempat peninggalan sejarah/warisan budaya, melihat pertunjukan/pameran seni, penggunaan busana daerah/tradisional, upacara adat. Status kunjungan penduduk ke tempat-tempat peninggalan sejarah/warisan budaya masih rendah. Pertunjukan/pameran seni yang sering diikuti adalah seni musik dan seni tari. Penggunaan busana daerah/tradisional hanya dilakukan pada saat menghadiri upacara keagamaan. Upacara adat banyak diikuti oleh

penduduk. Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan upacara adat paling beragam dan banyak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Gunawan dkk, tentang Analisis Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Desa Cihideung sebagai Desa Wisata. Penelitian ini dilakukan di Desa Cihideung yang mengalami perubahan sosial budaya dari desa yang didominasi oleh pertanian sawah dan sayuran menjadi desa wisata yang didominasi oleh berbagai macam pembangunan objek pariwisata beserta sarana pendukung lainnya yang dimiliki oleh para investor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perubahan sosial budaya yang terjadi antara lain: 1) Berkurangnya interaksi sosial; 2) Berkurangnya solidaritas sosial; 3) Proses sosialisasi dipengaruhi oleh unsur dari luar masyarakat Desa Cihideung; 4) Berkurangnya pengawasan sosial serta kepedulian; 4) Menghilangnya adat istiadat; 5) Meningkatnya eksistensi kesenian tradisional; 6) Mata pencaharian yang menjadi heterogen; 7) Terjadinya mobilitas sosial.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hadidjah Widyaiswara tentang "Bahasa Mempengaruhi Budaya atau Sebaliknya" yang berisi pembahasan tentang bahasa merupakan suatu produk budaya suatu bangsa, suatu bangsa tercermin dari budayanya dalam hal kosakata, kata, paragraf, wacana atau retorika. Juga membahas tentang fungsi bahasa secara umum, hakikat kebudayaan yang sangat kompleks, kebudayaan juga selalu dipandang sebagai suatu yang khas dari manusia karena dihubungkan dengan

keindahan, kebebasan dan keluhuran. Selain itu Bahasa dan budaya mempunyai hubungan yang koordinatif yakni hubungan yang sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Bahasa dapat juga diwujudkan sebagai refleksi diri, artinya bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Bahasa juga sebagai fenomena bahasa, artinya puluhan bahasa daerah punah dan lainnya berpotensi punah juga. Bahasa mempengaruhi budaya karena apa yang diungkapkan pengguna bahasa mencerminkan kebiasaan penutur. Budaya pengaruhi Bahasa karena dalam pembentukan bahasa juga lahir dari pola pikir manusia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Suwardani Oktober 2015 tentang Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Memproteksi Masyarakat Bali dari Dampak Negatif Globalisasi. Artikel ini menganalisis pentingnya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal bagi masyarakat Bali selain untuk menghadapi berbagai dampak negatif perubahan sosial yang diakibatkan globalisasi. Gejala yang dialami masyarakat Bali kini adalah perubahan sosial budaya yang sangat mendasar. Akselerasi informasi gelombang globalisasi membawa perubahan cukup signifikan pada masyarakat Bali, baik pada tataran *surface structure* (sikap dan pola-pola perilaku) dan *deep structure* (sistem nilai, pandangan hidup, filsafat dan keyakinan). Perubahan terjadi karena kontak budaya antar negara yang dimaknai adanya dialektika nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama yang saling mendominasi, yang memungkinkan terjadinya homogenisasi dan

neoliberalisasi pada seluruh aspek kehidupan termasuk nilai-nilai budaya lokal yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Bali. Kondisi ini menimbulkan spit dan kegamangan nilai karena masyarakat Bali lebih mengagungkan nilai modern dengan memarginalkan nilai transcendental. Akibatnya terjadi berbagai bentuk penyimpangan nilai moral yang tercermin dalam corak, gaya, dan pola hidup masyarakat. Oleh karenanya penguatan dan pewarisan nilai-nilai kearifan lokal Bali perlu dilakukan secara intensif pada generasi muda Bali.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Darusalam (2021) tentang Analisis Struktural Fungsional Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pipa Putih Kec. Pemulutan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dari struktur pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Pipa Putih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu dari teori Talcott Parson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membangun desa setiap struktur pemerintahan desa harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai tupoksi dan jabatan masing-masing. Pemerintahan desa menjalankan tugasnya sebagai penggerak roda pemerintahan desa, BPD sebagai mitra pemerintah desa untuk mendampingi dan mengawasi kinerja pemerintahan desa, serta partisipasi unsur masyarakat yang sangat berguna dalam pembangunan

fisik infrastruktur desa, masing-masing unsur menjalankan tugas sesuai fungsi dan kedudukan dalam masyarakat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Sasongko tentang Pembentukan Struktur Ruang Permukiman Berbasis Budaya (Studi Kasus: Desa Puyung - Lombok Tengah). Sejak lama disadari bahwa budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk struktur ruang permukiman. Pada masyarakat yang teguh memegang budaya seperti di Bali misalnya, struktur ruang permukiman secara makro sangat ditentukan oleh sistem kosmis yang diwujudkan melalui simbolisme gunung sebagai sakral dan laut sebagai profane atau duniawi, sedang pada skala mikro nampak pada pembagian ruang permukiman, dan dapat dikatakan bersifat tetap. Penggambaran struktur ruang permukiman juga dapat dilihat dari sisi budaya lain seperti pada pelaksanaan ritual dan upacara keagamaan. Acara ini bersifat rutin akan tetapi ruang yang digunakan tidak semata untuk ritual saja, sehingga strukturnya juga nampak temporal. Masyarakat Sasak di Pulau Lombok juga sangat terkait dengan budaya dalam menata ruang permukimannya, ataupun pada ritual daur hidup dan berbagai acara keagamaan. Melalui kajian ini dapat dilihat adanya pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya Sasak.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Supriadi Adhuri Dalam artikel ini saya membahas dampak UU Desa No.5 Tahun 1979 terhadap aksi sosial elit lokal. Dengan menggunakan studi kasus komunitas adat (marga) yang berlokasi di Lahat, Sumatera Selatan, saya berpendapat bahwa UU desa

tidak meminggirkan tradisi atau masyarakat adat. Pada tataran praktis atau perilaku, aktor dalam hal ini elit lokal menggunakan tradisi dan UU Desa sebagai acuan tindakannya. Namun, kedua struktur ini, tradisi dan UU Desa masih terseleksi. Pemilihan tersebut didasarkan pada pemahaman aktor tentang konteks tertentu dan tujuan tindakan mereka. Ketika tradisi menawarkan cara yang efisien untuk mencapai tujuan mereka, mereka memilih tradisi sebagai titik referensi untuk perilaku mereka. Dalam konteks lain, ketika mereka melihat UU Desa menawarkan lebih untuk kepentingan mereka, mereka merujuknya. Mungkin juga, dalam konteks tertentu, aktor menggunakan dan mengabaikan keberadaan beberapa elemen dari kedua struktur tersebut. Sebagai kesimpulan, saya menyarankan bahwa meskipun penerapan UU Desa seharusnya dipahami untuk menggantikan sistem tradisional marga, masyarakat tetap menggunakannya sebagai acuan tindakan mereka. Oleh karena itu, keliru jika dikatakan bahwa UU Desa telah meminggirkan organisasi sosial tradisional.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Safa'at, Dwi Yono (2017) tentang Peran Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Kesejahteraan Yang Berkeadilan. Pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan sangat diperlukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keberadaan masyarakat adat dan masyarakat tradisional mempunyai peran dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, namun peraturan perundang undangan belum

sepenuhnya memberikan perlindungan dalam pengelolaan pesisir. Pembangunan yang berbasiskan ekonomi umumnya sering mengabaikan kearifan lokal masyarakat, sehingga lingkungan yang bersih menjadi tercemar akibat pengabaian tersebut. Pembangunan yang berorientasikan nilai materialistik hanya membangun fisik yang justru memberikan keuntungan bagi penanam modal, bukan masyarakat itu sendiri. Bagaimanakah keadilan yang idealnya didapatkan oleh masyarakat adat dan tradisional untuk mencapai keadilan yang mensejahterakan. Pemerintah abai dan harus membenahi kebijakan dalam perundang-undangan sebagai pijakan melaksanakan pembangunan tanpa mengabaikan masyarakat adat itu sendiri, dan pemerataan pembangunan bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan pembangunan yang menjaga kelestarian alam dan berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat yang sudah berlangsung turun temurun. Pemerintah masih dirasa abai atas pengelolaan lingkungan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Darojah (2012) tentang Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Dari Ekonomi Pertanian Ke Ekonomi Industri Pada Masyarakat Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 1969-2010. Sebelum masuknya industri tali tambang, masyarakat Desa Kubangwungu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Setelah masuknya industri tali tambang dimungkinkan adanya perubahan kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui struktur sosial ekonomi masyarakat Desa

Kubangwungu ketika masih berbasis pertanian, mengetahui struktur sosial ekonomi masyarakat Desa Kubangwungu setelah berubah dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri tahun 1969-2010, mengetahui dampak industri tali tambang terhadap gaya hidup masyarakat Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya industri ke desa membawa pergeseran sosial ekonomi pada masyarakat terutama kegiatan ekonomi masyarakat Desa Kubangwungu dan pendapatan masyarakat. Saran penulis adalah para pengrajin dapat membina sikap mental lingkungan masyarakat, perlu dilakukan reorientasi konsep penyuluhan, masyarakat lebih berhemat dengan cara menabung.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Sutoro (2014) tentang Revolusi Mental Berdesa. Membuat Pembangunan Desa Lebih Bermakna Bagi Masyarakat Desa. Pemuka desa terbiasa berpikir tentang pembangunan desa sekadar membangun sarana fisik. Tetapi mereka kurang berpikir tentang lemahnya kualitas hidup dan kemiskinan rakyat desa. Pelaksanaan UU Desa, termasuk pendampingan desa, bisa menjadi momentum baru untuk melakukan revolusi mental pembangunan desa. Edukasi sosial-politik kepada warga masyarakat, pelatihan dan dorongan terhadap pemuka desa, maupun musyawarah desa menjadi arena dan kegiatan yang bisa

memperluas dan memperdalam perubahan makna-tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa tidak hanya berbentuk bangunan fisik, tetapi juga mengarah pada perbaikan pelayanan dasar, kualitas hidup manusia, serta peningkatan ekonomi lokal.

Yang membedakan tulisan saya dengan tulisan sebelumnya adalah tulisan sebelumnya menjelaskan budaya kebudayaan sebagai sistem nilai, cara hidup, pandangan hidup, dan pengaruh bahasa kebudayaan dalam menghadapi tantangan arus arus globalisasi. Sedangkan dalam tulisan saya lebih menekankan pada persoalan tradisi budaya berdesa dalam bermasyarakat, membangun, berpemerintahan dan berkotong-royogan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual ini disusun dalam rangka memberi jawaban secara teoritis terhadap pertanyaan penelitian serta menjadi acuan dalam melakukan studi di lapangan. Bagian Pertama, penulis akan melakukan tinjauan pustaka terhadap studi-studi budaya, pembangunan dan pemerintahan Desa, kedua tentang budaya berdesa (kearifan lokal). Dari semua konsep tersebut menjadikan sebuah teori untuk menjawab rumusan masalah.

1. Budaya

Kita pasti telah familier dengan kata budaya karena Indonesia memiliki beragam budaya yang tersebar di penjuru wilayahnya. Namun, apakah kamu telah mengetahui arti sebenarnya dari kata 'budaya'? Dalam kajian antropologi, budaya dianggap singkatan dari 'kebudayaan; sehingga

tidak ada perbedaan berdasarkan definisinya. Namun, berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur, ada beberapa pengertian budaya dan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut *culture*, yang secara etimologi berasal dari kata Latin *Colere*, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kata 'culture' juga kadang diterjemahkan sebagai 'kultur' dalam bahasa Indonesia, yang memiliki arti sama dengan kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Berikut ini rangkuman tentang pengertian budaya menurut para ahli, ciri, fungsi, unsur, serta contohnya yang ada di Indonesia, seperti dilansir dari laman Dosenpendidikan dan Saintifik. (dalam Alfi Yuda, 2021:7)

Untuk memahami budaya maka kita perlu memahami apa itu kebudayaan. Kebudayaan itu ibarat sebuah lensa. Bayangkan saja jika anda sedang memaknai lensa untuk meneropong sesuatu maka anda akan memilih satu fokus tertentu. Dari fokus itulah anda akan membidik objek dengan tepat. Objek itu bisa manusia atau binatang, benda atau bahkan gagasan, termasuk gagasan tentang dunia sekeliling. Pertanyaannya adalah apakah mungkin seseorang dapat melihat satu objek tertentu secara

lebih tajam tanpa lensa? Tentu saja bisa, artinya dia akan memandang apa adanya, artinya dunia sebagai fakta tanpa fokus tertentu. Tetapi, kalau kita memandang sesuatu dari sudut pandang kebudayaan maka kita menjadikan kebudayaan sebagai sebuah lensa, artinya sebuah pandangan yang tepat, dan kebudayaan mengajarkan kepada kita untuk memandang sesuatu secara fokus dan secara sadar.

Betapa sering awam memberikan arti kebudayaan dengan cara yang sangat sederhana. Ada yang mengatakan kebudayaan itu merupakan seni, padahal patut diingat bahwa kebudayaan bukan sekedar seni, kebudayaan melebihi seni itu sendiri karena kebudayaan meliputi sebuah jaringan kerja dalam kehidupan antar manusia, bahkan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, semua manusia merupakan aktor kebudayaan karena manusia bertindak dalam lingkup kebudayaan.

Saya akan mengutip beberapa definisi kebudayaan sebagai berikut: *Pertama*, Iris Varner dan Linda Beamer dalam *intercultural communication in the global workplace*, mengartikan kebudayaan sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Pandangan itu berisi apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap. Mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama atau yang berkaitan dengan orang lain. (dalam Norhayati Ismail, 2001:98).

Kedua, kebudayaan dalam arti yang luas, adalah perilaku yang telah tanam, ia merupakan totalitas dari sesuatu, yang dipelajari manusia, akumulasi, dari pengalaman yang dialihkan secara sosial (disosialisasikan) tidak sekedar sebuah catatan ringkas tetapi dalam bentuk perilaku manusia pelajaran sosial (*social learning*).

Ketiga, kebudayaan merupakan pandangan hidup dari kelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar/tanpa dipikirkan yang semua diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari generasi kepada generasi berikutnya.

Keempat, kebudayaan adalah komunikasi simbolis, simbolisme itu adalah keterampilan kelompok, pengetahuan, sikap, nilai dan motif. Makna dari simbol-simbol itu dipelajari dan disebarluaskan dalam masyarakat melalui institusi.

Kelima, kebudayaan terdiri dari pola-pola yang eksplisit maupun implisit dari dan untuk sebuah perilaku tertentu yang dialihkan melalui simbol-simbol yang merupakan prestasi kelompok manusia termasuk peninggalan termasuk artefak yang merupakan inti atau esensi dari gagasan-gagasan dan dikemas dalam nilai yang mereka terima. Dengan kata lain sistem kebudayaan dapat diterangkan melalui produk atau tindakan yang dipandang menjadi faktor berpengaruh terhadap tindakan mereka.

Keenam, kebudayaan adalah jumlah jumlah keseluruhan perilaku yang dipelajari oleh sekelompok orang yang secara umum menerangkan sebuah tradisi kehidupan yang diwariskan oleh sebuah generasi kepada generasi lain.

Ketujuh, Larry A. Samovar. dan Richard E. Porter mengungkapkan kebudayaan dapat berarti simpanan yang akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi. Demikian pula kebudayaan bisa berarti sistem pengetahuan yang dipertukarkan oleh sejumlah orang dalam sebuah kelompok yang besar.

Kedelapan, menurut Levo-Henriksson (1994:133), kebudayaan itu meliputi semua aspek kehidupan kita setiap hari, terutama tentang pandangan hidup apapun bentuknya baik mitos maupun sistem nilai dalam masyarakat.

Kita telah membaca beberapa pengertian kebudayaan bahwa kebudayaan merupakan suatu unit interpretasi, ingatan, dan makna yang ada di dalam manusia dan bukan sekedar kata-kata. Ia meliputi kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma, semua ini merupakan langkah awal kita merasa berbeda dalam sebuah wacana. Kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia karena setiap orang akan menampilkan kebudayaannya kalau ia bertindak, seperti tindakan membuat ramalan atau

harapan tentang orang lain atau perilaku mereka. Terakhir kerajaan melibatkan karakteristik suatu kelompok manusia dan bukan sekedar pada individu (dalam Alo Liliweri, 2007:27).

Pengertian kebudayaan tersebut mengandung beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang sama, yakni kebudayaan itu ada diantara manusia yang sangat beraneka ragam, diperoleh dan diteruskan secara sosial melalui, pembelajaran, dijabarkan dari komponen biologis, psikologis, sosiologis sebagai eksistensi manusia berstruktur, terbagi dalam beberapa aspek, dinamis, dan nilainya relatif. Dari pengertian diatas tentang konsep budaya maka penulis menyimpulkan bahwa budaya merupakan kebudayaan (*culture*) yang menghasilkan cipta, rasa dan karsa melalui cara hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Kearifan lokal

Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Sedangkan menurut Akhmar (dalam Dhoki, dkk 2016:15), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam bertingkah-laku sehari-hari suatu masyarakat.

Kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok, masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun temurun. (dalam Eko A. Meinarmo dkk 2015:102) dari buku manusia dalam kebudayaan dan masyarakat. Kearifan lokal muncul dalam masyarakat sendiri, disebarluaskan secara non-formal, dan memiliki secara kolektif oleh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, kearifan lokal juga dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam di dalam cara hidup masyarakat yang bersangkutan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup.

Kearifan lokal adalah salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Kearifan lokal adalah cara hidup suatu masyarakat dan berhubungan secara spesifik dengan budaya tertentu. Setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang harus dijaga. Hal ini termasuk pendidikan, kesehatan, serta nasehat-nasehat leluhur untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan alam tempat tinggalnya. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam nilai-nilai kelompok masyarakat tersebut, seperti pada nyanyian, pepatah, tarian, atau bahkan semboyan. Nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam di dalam kelompok masyarakat, akan menjadi bagian hidup yang tidak dapat terpisahkan. Kamu bisa melihatnya melalui perilaku sehari-hari masyarakat tersebut (dalam Husnul Abdi, 2021:20).

Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja). Keseragaman budaya Indonesia merupakan modal besar membangun bangsa di mana setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dan mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal menurut Susanti, ialah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal ialah: 1). Cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya, 2). Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, 3). Jujur, 4). Hormat dan santun, 5). Kasih sayang, dan peduli, 6). Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, 7). Keadilan dan kepemimpinan, 8). Baik dan rendah hati, 9). Toleransi, cinta damai dan persatuan. Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati diri melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya. Dalam kerangka itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif kearifan lokal. Sebagai misal, keterbukaan dikembangkan dan kontekstualisasikan menjadi kejujuran. Kehalusan diformulasi sebagai keramah-tamahan yang tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, dan demikian seterusnya. Kearifan

lokal merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam. Sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat.(dalam Nuraini Asriati, Oktober 2012:12).

Kearifan lokal (*local genius*) (dalam FX. Rahyono, 2009:7) adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidupnya serta terwujud dalam ciri-ciri budaya yang dimilikinya. Dapat diartikan bahwa seorang anggota masyarakat yang berbudaya menjadi cerdas berkat pengalaman hidup yang dihayatinya. Kearifan dalam budaya merupakan bentuk kecerdasan yang dihasilkan oleh masyarakat pemilik kebudayaan yang bersangkutan.

3. Pembangunan Desa

Menurut Siagian (dalam Hakim, 2011:25) pembangunan merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih lanjut dalam Effendi (2002:9) menyatakan pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara

berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Peraturan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dengan melibatkan Badan Musyawarah Desa dan unsur masyarakat yang partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka tujuan pembangunan desa (dalam Kessa, 2015:18). Hal tersebut juga didukung dengan suatu pembangunan partisipatif yang merupakan suatu sistem pengolahan pembangunan di desa yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh satuan kerja

perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, kepada desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Budaya Berdesa

Dalam Sutoro Eko (2017:10) tentang Revolusi Mental Berdesa menjelaskan bahwa tradisi berdesa Desa bukan hanya tempat untuk bermasyarakat tetapi juga tempat untuk berdesa bagi masyarakat. Berdesa berarti masyarakat menggunakan desa sebagai basis, rumah dan arena untuk bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan dan berpenghidupan. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, yang di dalamnya mengandung otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ketika mandat dari rakyat koheren dengan otoritas dan akuntabilitas, maka legitimasi dan kepercayaan akan menguat. Desa mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada warga masyarakat. Kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal dalam UU Desa merupakan instrumen penting untuk melembagakan masyarakat/tradisi berdesa. Melalui kewenangan itu desa mempunyai otoritas dan akuntabilitas mengatur dan mengurus barang-barang publik untuk pelayanan kepada kepentingan masyarakat

setempat. APBDesa digunakan untuk membiayai kewenangan yang direncanakan. Sebaliknya masyarakat juga membiasakan diri untuk memanfaatkan desa sebagai representasi negara yang mengatur dan mengurus mereka, bukan hanya sebatas terlibat dalam pemilihan kepala desa, bukan juga hanya mengurus administrasi, tetapi yang lebih penting adalah memanfaatkan desa sebagai institusi yang melayani kepentingan mereka.

5. Partisipasi dalam Pembangunan

Dalam Sutoron Eko (2017: 15) kontribusi budaya dalam berdesalam dan partisipasi masyarakat bisa di lihat dari Gerakan warga aktif dan swadaya politik rakyat. Setiap warga desa mempunyai ranah kegiatan sosial dan politik. Berdasarkan kategori ini ada empat tipe warga. *Tipe pertama* adalah konstituen, yang hanya melakukan kegiatan memilih secara politik tetapi tetapi tidak aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. *Tipe kedua* adalah relawan, yang hanya memilih dan aktif dalam kegiatan sosial. *Tipe ketiga* adalah warga kritis, yang selalu kritis bersuara terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tidak aktif dalam kegiatan sosial. Tipe ini biasanya disebut asal bunyi yang tidak disukai oleh masyarakat dan pemuka desa. *Tipe keempat* adalah warga aktif, yakni aktif dalam bersuara dan aktif dalam kegiatan sosial. UU Desa menghendaki tumbuhnya warga aktif dalam ranah desa ini.

Dari tradisi parokial ke tradisi religius. Masyarakat desa tentu mempunyai ikatan dan kegiatan berdasarkan kekerabatan dan keagamaan.

Ini sangat penting, tetapi tidak menjadi menu utama pembicaraan dan kegiatan sehari-hari. Masyarakat desa perlu didorong ke tradisi republik, yakni membicarakan, memperhatikan dan menjalankan aktivitas yang terkait dengan kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, lingkungan, sanitasi, irigasi, dan lain-lain. Rumah ibadah pun tidak cukup hanya untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga untuk ibadah sosial, yakni untuk membicarakan masalah-masalah publik.

Edukasi sosial dan politik. Setiap aktivitas desa (musyawarah desa, perencanaan dan penganggaran, pemilihan kepala desa, dan sebagainya), yang memperoleh sentuhan pendampingan, tidak boleh terjebak pada penggunaan alat dan menghasilkan dokumen semata tanpa ada sentuhan filosofi (roh). Pendampingan terhadap seluruh aktivitas desa harus disertai dengan edukasi sosial dan politik secara inklusif dan partisipatoris. Dalam perencanaan desa, misalnya, tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan yang akan dijabarkan menjadi agenda proyek. Di balik perencanaan desa ada pembelajaran bagi orang desa membangun impian kolektif dan mandiri mengambil keputusan politik.. Demikian juga dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang kaya data, aplikasi dan disertai jaringan online. SID tidak hanya alat dan teknologi. Di balik SID ada pembelajaran bagi orang desa untuk membangun kesadaran kritis terhadap diri mereka sendiri sekaligus untuk memperkuat representasi hak dan kepentingan rakyat.

Membuat pembangunan desa lebih bermakna bagi masyarakat desa. Pemuka desa terbiasa berpikir tentang pembangunan desa sekadar membangun sarana fisik. Tetapi mereka kurang berpikir tentang lemahnya kualitas hidup dan kemiskinan rakyat desa. Pelaksanaan UU Desa, termasuk pendampingan desa, bisa menjadi momentum baru untuk melakukan revolusi mental pembangunan desa. Edukasi sosial-politik kepada warga masyarakat, pelatihan dan dorongan terhadap pemuka desa, maupun musyawarah desa menjadi arena dan kegiatan yang bisa memperluas dan memperdalam perubahan makna-tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa tidak hanya berbentuk bangunan fisik, tetapi juga mengarah pada perbaikan pelayanan dasar, kualitas hidup manusia, serta peningkatan ekonomi lokal.

5. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa merupakan salah satu bentuk negara hadir untuk melayani warganya. Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa menyediakan pelayanan kepada Masyarakat serta mensejahterakan masyarakat desanya. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila kebutuhan masyarakat desa dapat dipenuhi, yakni terpenuhi hak-haknya sebagai warga masyarakat; yaitu bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi serta mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Pemerintah Desa. Hal ini sangat berkaitan erat dengan peran Pemerintah Desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat desa. Dalam kinerjanya, Pemerintah Desa harus

menjalankan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan pelayanan di desa mengalami peningkatan dan juga dapat mensejahterakan masyarakatnya. Istanto (dalam Diana Firiana, 2019: 18) mendefinisikan konsep pemerintahan adalah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara, selanjutnya Labolo (dalam Diana Fitriana, 2019: 18) mengungkapkan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana Masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. (Dalam Wastiono Tahir, 2019:18) juga mendefinisikan desa adalah suatu kesatuan Masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik ekonomi, sosial dan keamanan. Memiliki susunan pengurus yang dipilih secara bersama. Memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Seperti yang dikatakan Widjaja (dalam Diana Firiana, 2019:18) Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagian perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa. Desa dibentuk lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

- f. Berdasarkan hak asal usul yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warga.
- g. Dengan upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada dalam daerah kabupaten dan/atau kota. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain menundukkan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan kepada masyarakat. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dukuh, kepala urusan dan kepala seksi yang bertugas membantu kepala desa menjalankan visi dan misi atau tujuannya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah

dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Pemerintah desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik. Penerapan pasca diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan ke arah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya:

- 1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari,
- 2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam undang-undang yang baru. Misalnya dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat istiadat, membuat peraturan desa bersama dengan kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan,
- 3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan, artinya proses politik pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi

bermuara dari kebijakan Pemerintah pusat secara terpusat (sentralistik), melainkan berasal dari partisipasi Masyarakat.(Solekhan, 2014:16).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (dalam Maria, 2005:23). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selain pemerintah desa, terdapat pula BPD yang dimana fungsinya adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini dapat disimpulkan bahwa BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pembangunan desa. Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan musyawarah desa atau musdes pada agenda yang mengharuskan adanya musdes, salah satu contohnya adalah rencana pendirian BUMDesa. Tanpa persetujuan BPD, BUMDesa tidak bisa didirikan.(www.berDesa.com).

Dari pengertian di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya masing-masing. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintahan pusat untuk mengatur Masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pemerintahan di wilayah desa. Berdasarkan kerangka konseptual di atas sehingga penulis menyimpulkan pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara untuk menjawab dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah, dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang digunakan secara menyeluruh untuk dapat menghasilkan penelitian yang tepat sehingga

hasil suatu penelitian dapat di katakan ilmiah. Jenis Penelitian, Untuk mengkaji penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang artinya penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan yang dilakukan secara deskripsi yang berarti gambaran berupa kata-kata dan Bahasa (Maleong 2018:6).

Penelitian deskriptif kualitatif yakni berusaha untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian yang ada dan terjadi di lapangan dengan menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang di peroleh secara sistematis dan akurat dengan strategi naratif yakni strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan terkait apa yang terjadi di kehidupan mereka, informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif. Di akhir tahap penelitian, peneliti harus mengabungkan dengan gaya naratif pandangan pandangan tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti sendiri (Clandinin dan Connelly, 2000 dalam John w. Creswell) studi naratif memiliki fokus kontekstual yang spesifik, misalnya cerita yang di tutur oleh para pengajar atau anak anak di kelas (Ollerenshaw dan60 Creswell, 2002) atau cerita yang di tuturkan tentang organisasi (Czarniawska,2004).

Objek Penelitian, Penelitian ini berfokus kontribusi budaya berdesa dalam pembangunan. Dengan subjek penelitian atau narasumber sasaran, meliputi : Lurah, perangkat kalurahan 3orangm Dukuh, dan 9 masyarakat di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data, Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan antara lain yakni :

Pertama adalah observasi yang di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang di selidikinya, sehingga observasi tidak langsung adalah pengamatan yang di lakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan di selidiki yang di mana menurut Selltiz (dalam atisubati 2020) yang di maksud dengan observasi adala metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti, data peneliti tersebut dapat diamati oleh peneliti.

Kedua wawancara sebagai proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan Tanya jawab antar peneliti dengan informen dalam penelitian ini yang akan di lakukan nanti adalah wawancara langsung dengan narasumber dengan cara berdialog langsung dengan Masyarakat maupun narasumber lain menggunakan pedoman wawancara ataupun tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Tabel I.1
Daftar Narasumber/*Informan* Penelitian

No	Nama	Tempat Lahir	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Anang Patri Widyantoro	Sleman	Laki-laki	Carik	S1	38
2	Sumarsono	Yogyakarta	Laki-laki	Dukuh Brengosan	SMA	62
3	Dani Prasetyo	Bantul	Laki-laki	Kamituwo	S1	29
4	Ajeng	Sleman	Perempuan	Pedagang	SMA	30
5	Suryo	Bantul	Laki-laki	Tokoh masyarakat	SMA	65
6	Sigit	Sleman	Laki-laki	Masyarakat biasa	SMA	71
7	Teguh Soko Wiyanto	Sleman	Laki-laki	Ketua Peternak Sapi	SMA	45
8	Angger Gigih Wiratmoko	Sleman	Laki-laki	Ketua kelompok perikanan	SMA	57
9	Sarijo	Sleman	Laki-laki	RT	SMA	71
10	Supriati	Yogyakarta	Perempuan	Petani campuran	SMP	81
11	Sujiono	Bantul	Laki-laki	Mantan ketua LPMD	S1	62
12	Joko	Sleman	Laki-laki	Masyarakat	SMP	36
13	Selvi	Sleman	Perempuan	Kaur keuangan	S1	33

Sumber: data informan di Kalurahan Donoharjo tahun 2022

Ketiga dokumentasi, dokumentasi menurut Maleong, 2005 (dalam atisubati 2020) pengumpulan data yang didasarkan pada catatan-catatan tertulis atau dokumen maupun rekaman yang ada di daerah penelitian dan Langkah ini dilakukan agar hasil wawancara terdokumentasi secara baik, dokumen khusus terkait penyelenggaraan ada seperti RPJM Desa yang memuat profil dan lain-lain, surat atau berita keterangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Desa, foto dan rekam suara.

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memfokuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Maleong, 2018). Beberapa tahap yang akan dilalui untuk menganalisis data antara lain pertama, saya mengumpulkan data (data collection) Pengumpulan Data dilakukan melalui hasil data data obsevasi, wawancara dan dokumentasi yang secara khusus terkumpul mulai pelaksanaan penelitian di tanggal 29 Februari 2021 hingga tanggal 23 Maret 2021. Kedua, reduksi data (data reduction) digunakan untuk analisis yang menajamkan menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil agar peneliti lebih mudah menganalisis data tersebut yakni secara khusus penulis mereduksi pada pola penyelenggaraan PemerintahDesa hingga munculnya permasalahan terkait kontribusi budaya berdesa dalam pembangunan. Ketiga, penyajian data (data display) adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan) sehingga penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Keempat, penarikan kesimpulan (conclution Drawing/verivication).

BAB II

DESKRIPSI KALURAHAN DONOHARJO

A. Sejarah Kalurahan Donoharjo

Desa Donoharjo terbentuk pada tahun 1946 yang merupakan gabungan dari empat kelurahan lama yaitu kelurahan Suruh, Balong, Tanjung, dan Karanglo. Saat itu perangkat desa hanya terdiri dari :

1. Lurah : Kepala Desa
2. Sekdes : Bagian umum
3. Bagian Kemasyarakatan : Urusan Agama
4. Kemakmuran
5. Sosial

Selanjutnya kepala desa yang pernah memimpin yakni :

1. Kades I : Bpk. Noto Sukarjo
2. Kades II : Bpk. Suwarti Harjo
3. Kades III : Bpk. Heri Sartono, SH
4. Kades IV : Bpk. Soegito Hadi, Bc.HK
5. Kades V : Bpk. Wijanarko, SE

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Donoharjo yang Sritaman dan Srigunung, Sritaman merupakan semboyan Jawa yang menggambarkan keadaan suatu tempat yang terlihat bagus dari dekat. Dalam pemerintahan desa ini dapat

tercermin di dalam administrasi desa yang tertib dan pelayanan yang bagus terhadap masyarakat. Tingkat kepercayaan dan kepuasan kerja kepada Pemerintahan Desa dari masyarakat tinggi. Srigunung merupakan semboyan jawa yang menggambarkan keadaan suatu tempat yang terlihat elok atau bagus dari luar atau dari jauh. Dalam pemerintahan Desa fungsi informasi yang baik adalah gambaran dari ungkapan semboyan Srigunung tersebut. Fungsi informasi yang baik dalam pemerintahan desa tercermin pada mudahnya masyarakat desa dapat mengakses segala informasi dari desa, yang meliputi, informasi tentang kegiatan pemerintahan desa, kemajuan pembangunan desa dan informasi penggunaan anggaran desa yang digunakan untuk pembangunan desa.

2. Misi

Misi Desa Donoharjo merupakan penjabaran yang lebih operasional dari visi. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di Desa Donoharjo maka disusunlah misi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan.
- b. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang murah, berkualitas dan meningkatkan kemampuan Iptek dan keterampilan warga.
- c. Sistem informasi desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

- d. Menggali sumber-sumber pendapatan potensial desa yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- e. Membangun serta mendorong kemitraan dalam upaya pengembangan terutama dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
- f. Menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa.
- g. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program desa baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan.

C. Geografis Kalurahan Donoharjo

1. Batas Wilayah

Desa Donoharjo yang berada sekitar 5 Km arah barat laut Kecamatan Ngaglik dan 8 Km arah timur laut ibukota Sleman memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain disekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Wilayah Desa Donoharjo secara geografis berada di koordinat 070 40'.7"LS - 070 43'00.9"LS dan 1100 27'59.9"BT - 1100 28'51.4"BT.

Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Donoharjo berada pada 220 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2225 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 16-17°C. Desa Donoharjo dilalui Sungai Boyong di sebelah Timur. Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di Desa Donoharjo tersebut membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah.

Secara administrasi Desa Donoharjo terletak di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan batas :

- a. Sebelah Utara yaitu Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem
- b. Sebelah Selatan yaitu Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik
- c. Sebelah Barat yaitu dengan Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman
- d. Sebelah Timur dengan Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik.

Wilayah Desa Donoharjo terdiri dari 16 Padukuhan dan 37 RW dan 79 RT antara lain :

- a. Padukuhan Balong terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- b. Padukuhan Wonosari terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- c. Padukuhan Kayunan terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- d. Padukuhan Ngepas Lor terdiri dari 5 RT dan 2 RW
- e. Padukuhan Ngepas Kidul terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- f. Padukuhan Jetis Suruh terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- g. Padukuhan Surah terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- h. Padukuhan Brengosan terdiri dari 6 RT dan 2 RW
- i. Padukuhan Gondang Lutung terdiri dari 6 RT dan 2 RW
- j. Padukuhan Donolayan terdiri dari 6 RT dan 3 RW
- k. Padukuhan Jetis Donolayan terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- l. Padukuhan Bantarjo terdiri dari 6 RT dan 3 RW
- m. Padukuhan Banteran terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- n. Padukuhan Panasas terdiri dari 8 RT dan 4 RW
- o. Padukuhan Ngeplak terdiri dari 6 RT dan 3 RW
- p. Padukuhan Penen terdiri dari 4 RT dan 2 RW

D. Luas Wilayah dan Peruntukannya

Potensi wilayah Desa Donoharjo dengan lahan seluas 660,7210 Ha terbagi dalam beberapa peruntukan seperti bangunan umum, jalan, sawah dan ladang, pemukiman, kuburan, dan lain-lain (lapangan olahraga). Luas lahan yang diperuntukkan bangunan umum adalah seluas 17,2705 Ha, sawah seluas 438,6470 Ha, permukiman dan pekarangan seluas 196,2034 Ha, pekuburan dan prasarana umum lainnya seluas 25.8706 Ha.

Penggunaan Lahan Penggunaan lahan terbesar adalah sektor pertanian sehingga sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau buruh tani. Berikut gambaran kondisi pertanian di Desa Donoharjo. Sementara itu, penggunaan lahan untuk aktivitas ekonomi, terdiri dari: lahan untuk pertokoan/perdagangan/pasar 7.500 m², lahan untuk perkantoran 2.0016 Ha; tanah wakaf 3904 m²; tanah sawah 438.6470 Ha; dan lahan untuk pekarangan 196.2034 ha. Berikut tabel penggunaan lahan Desa Donoharjo. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Luas Wilayah Desa Donoharjo

No	Sektor	Luas Lahan/Potensi
1	Pertokoan/perdagangan/pasar	7.500 m ²
2	Lahan untuk perkantoran	2.0016 ha
3	Lahan untuk wakaf	3904 m ²
4	Tanah sawah	438.6470 ha
5	Lahan untuk pekarangan	146,9419 ha

Sumber: RPJMDes Tahun 2016-2022 Kalurahan Donoharjo

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 peruntukan tanah di Kalurahan Donoharjo. Tiga diantaranya merupakan tanah milik desa sedangkan 2 peruntukan yang lain yaitu milik penduduk Kalurahan

Donoharjo yaitu sawah seluas 438.6470 ha, pekarangan seluas 146,9419 ha dan lahan wakaf seluas 3904 ha. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa Kalurahan Donoharjo memiliki sawah dan ladang yang cukup luas baik milik Pemerintah Desa atau pun penduduk desa. Hal itu juga menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Donoharjo memiliki mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Di mana buruh tani yang berpenghasilan kurang dari Rp 600.000,00 per bulan menjadi salah satu kriteria penerima BLT-Desa di Kalurahan Donoharjo menurut kriteria miskin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

E. Demografi

Demografi merupakan data mengenai jumlah penduduk, dalam penelitian ini terdapat beberapa data terkait demografi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan.

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Tabel II.2
Jumlah Pendudukan berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	≤1	158	1
2	1-4	726	4,57
3	5-14	2.181	13,73
4	15-39	5.418	34,10
5	40-64	5.395	33,96
6	≥65	2.007	12,64
Jumlah		15.885	100

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Donoharjo mayoritas berada di usia 15-39 tahun atau usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah persentasinya yaitu 34,10%. Kemudian untuk jumlah penduduk menurut usia yang tergolong minoritas yaitu berada di usia ≤ 1 tahun sejumlah 158 jiwa atau 1%. Selain itu, informasi yang dapat diketahui yaitu di mana terdapat sejumlah 2.007 jiwa usia rentan atau dapat dikatakan usia 65 ke atas adalah usia yang rentan sakit, tidak terkecuali rentan untuk tertular Covid-19. Kaitannya dengan penelitian ini terutama terletak dalam salah satu kriteria calon penerima BLT-Desa yaitu masyarakat yang terdampak Covid-19.

2. Jumlah Kartu Keluarga atau KK

Jumlah KK atau Kartu Keluarga pada tahun 2020 di Kalurahan Donoharjo adalah 5.651 KK dengan kepadatan 1.938 jiwa per Km². Beberapa jumlah KK ini kemudian mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa karena BLT-Desa ini diperuntukkan bagi keluarga miskin atau rentan miskin bukan untuk perorangan.

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Tabel II.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	103	68	171	2,04
2	Buruh tani	1.797	1495	3.292	39,22
3	Buruh pabrik	801	536	1.337	15,93
4	PNS	189	202	391	4,66
5	Pegawai swasta	840	633	1.473	17,55
6	Pedagang	678	770	1.448	17,25
7	TNI	35	0	35	0,41
8	POLRI	47	1	48	0,57
9	Dokter	3	6	9	0,11
10	Bidan	4	4	8	0,10
11	Perawat	4	20	24	0,28
12	Lainya	54	104	158	1,88
13	Belum bekerja/ tidak bekerja			7.491	47,25
Total		4.555	3.839	15.885	100

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo 2019

Berdasarkan tabel di atas mengenai jumlah penduduk menurut pekerjaan mayoritas penduduk Kalurahan Donoharjo bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai buruh tani sejumlah 3.292 jiwa atau 39,22%. Sedangkan minoritas penduduk Kalurahan Donoharjo bekerja di bidang kesehatan yaitu Bidan yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan atau 0,10%. Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel diatas yaitu banyak penduduk Kalurahan Donoharjo yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani, buruh pabrik, petani, pegawai swasta dan pedagang. Kemudian mata pencaharian tersebut adalah jenis pekerjaan yang banyak terkena dampak ekonomi semenjak adanya pandemi Covid-19. Misalnya saja buruh pabrik, banyak buruh

pabrik yang kemudian terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pabriknya sudah tidak bisa beroperasi lagi, kemudian pegawai swasta juga banyak yang mengalami perampingan pegawai karena perusahaannya bangkrut serta pedagang terutama pedagang kecil atau pedagang kaki lima juga banyak yang gulung tikar karena pandemi Covid-19. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu syarat yang digunakan untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel II.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD	3.429	22,70
2	SMP	2.320	15,36
3	SMA	4.657	30,85
4	D1	167	1,10
5	D3	3.308	21,90
6	S1	789	5,22
7	S3	436	2,89
8	Tidak sekolah /belum sekolah	779	20,39
Total		15.885	100

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo Tahun 2019

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Donoharjo rata-rata berpendidikan cukup baik. Angka putus sekolah dan tidak bersekolah sangat kecil. Masyarakat mayoritas bersekolah sampai atau sedang menempuh jenjang SMA/ sederajat dan SD/ sederajat. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang berpendidikan sampai atau sedang menempuh Strata 3 (tiga). Sesuai dengan data yang ada dalam jumlah penduduk yang diklasifikasikan kedalam pendidikan bahwa begitu banyaknya penduduk Kalurahan Donoharjo yang masih sadar akan

pendidikan untuk masa yang akan datang. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik wilayah yang sangat urban, yang masyarakatnya cenderung menganggap pendidikan adalah prioritas.

F. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Pendidikan

Tabel II.5
Fasilitas Pendidikan

No	Jenis fasilitas	Jumlah (unit)	Presentase(%)
1	Gedung Paud	27	64,29
2	Gedung SD	9	21,43
3	Gedung SMP	3	7,14
4	Gedung SMA	3	7,14
Total		42	100

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo Tahun 2019

Di Kalurahan Donoharjo ini terdapat beberapa gedung sebagai sarana pendidikan mulai dari gedung Paud, gedung SD, gedung SMP serta gedung SMA, dengan jumlah total 42 gedung. Dengan jumlah gedung terbanyak yaitu gedung Paud yang berjumlah 27 gedung atau 64,2% dari total sarana pendidikan yang ada di Kalurahan Donoharjo. Fasilitas pendidikan yang ada di Kalurahan Donoharjo tentunya dapat menunjang tingkat pendidikan masyarakat desa yang nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Desa. Dikatakan demikian karena menurut peneliti antara tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan di suatu wilayah itu saling berkaitan. Contohnya ketika di suatu wilayah tidak ada fasilitas pendidikan sama sekali bagaimana masyarakat di wilayah tersebut akan mengenyam pendidikan dengan baik,

hal itu tentunya akan berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah termasuk di Kalurahan Donoharjo.

2. Sarana Kesehatan

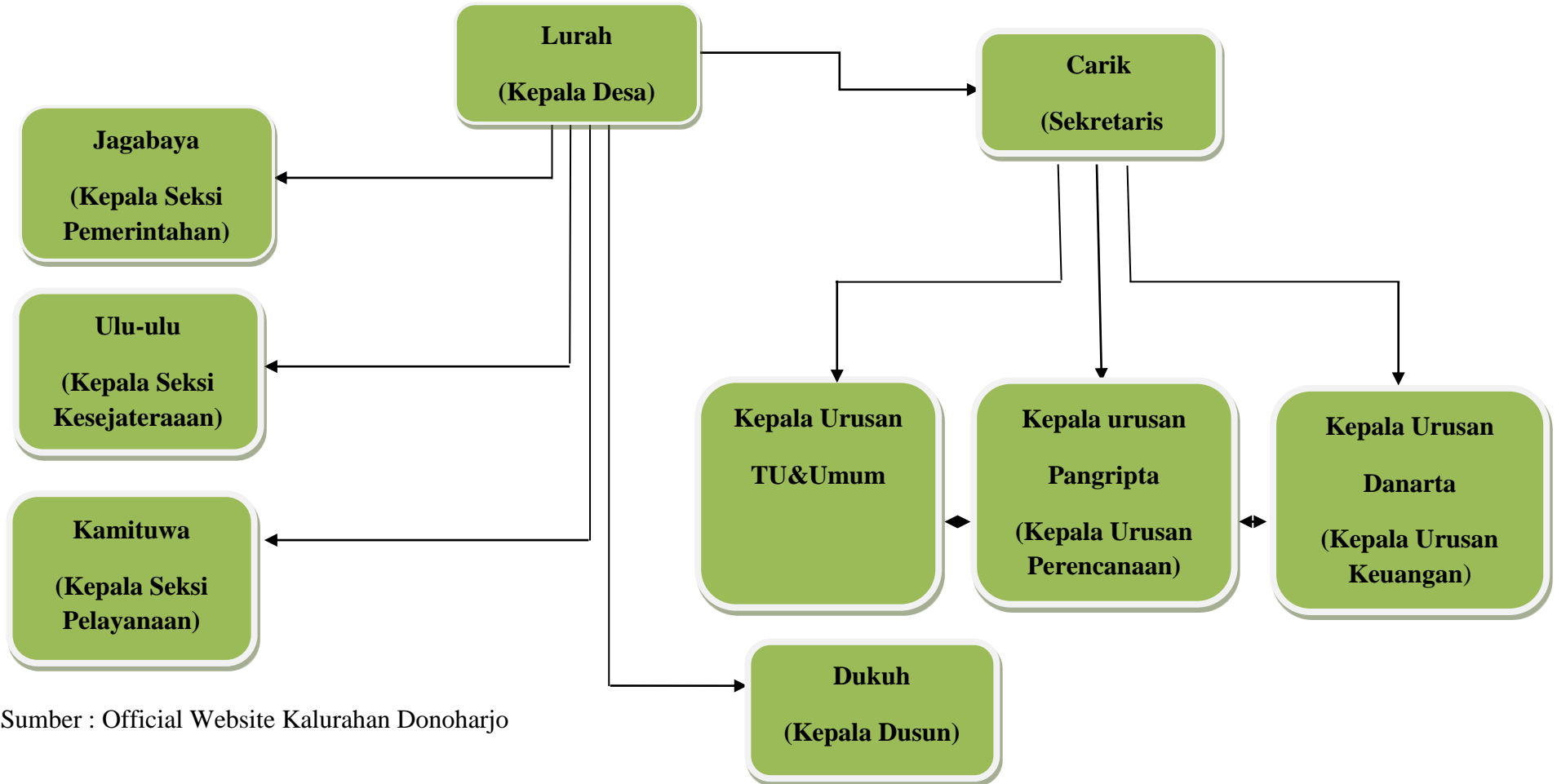
Tabel II.6
Fasilitas kesehatan

No	Jenis fasilitas	Jumlah (unit)	Presentase (%)
1	Posyandu	16	53,33
2	Puskesmas	1	3,33
3	Rumah Sakit	1	3,33
4	Rumah Bersalin	1	3,33
5	Praktek Dokter	9	30
6	Apotik	2	6,68
Total		30	100

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo 2019

Berdasarkan data di atas Kalurahan Donoharjo memiliki 6 sarana kesehatan mulai dari Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Praktek Dokter dan Apotek yang tersebar di wilayah kelurahan Donoharjo. Dengan jumlah terbanyak yaitu Praktek Dokter sejumlah 9 tempat atau 30% dari total sarana kesehatan yang ada di Kalurahan Donoharjo. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada di Desa Sumbermulyo akan mempermudah bagi masyarakat desa yang akan berobat, kemudian bagi penduduk yang mempunyai penyakit kronis atau penyakit menahun juga dapat di rawat di Rumah Sakit terdekat tanpa harus ke luar wilayah untuk mencari fasilitas kesehatan yang lain. Selain itu di masa pandemi saat ini fasilitas kesehatan sangatlah diperlukan, khususnya untuk menangani pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Di Kalurahan Donoharjo fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menangani pasien positif Covid-19 adalah Puskesmas dan Rumah.

Bagan II.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta



Sumber : Official Website Kalurahan Donoharjo

Gambar di atas menunjukkan tingkatan jabatan Pemerintah Desa di mana Lurah atau Kepala Desa langsung membawahi Kepala Seksi (pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan) dan Kepala Dukuh. Kemudian Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan (keuangan, tata usaha dan umum dan perencanaan). Kalurahan Donoharjo adalah salah satu desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga, sebutan untuk jabatan Pemerintah Desa di ganti agar Kepala Desa (Lurah)

- a. Sekretaris Desa (Carik)
- b. Jogoboyo (Kepala Seksi Pemerintahan)
- c. Ulu-ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan)
- d. Kamituwo (Kepala Seksi Pelayanan)
- e. Danarto (Kepala Urusan Keuangan)
- f. Tata Laksana (Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha)
- g. Pangripto (Kepala Urusan Perencanaan)

Di bawah ini merupakan susunan Pemerintah Kalurahan Donoharjo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel II.7
Nama-nama Lurah dan Perangkat Kalurahan Donoharjo

No	Jabatan	Nama
1.	Lurah (Kepala Desa)	Hadi Rintoko, S.T
2.	Carik (Sekretaris Desa)	Anang Partri W. S.T
3.	Jogoboyo (Kepala Seksi Pemerintahan)	R. Fendi Aji Putra, S.H.
4.	Ulu-ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan)	Seto Aji Kusumantoro, S.E
5.	Kamituwo (Kepala Seksi Pelayanan)	Dani Prasetyo, S.Si
6.	Danarto (Kepala Seksi Keuangan)	Drs. Sugandono
7.	Tata Laksana (Kepala Urusan Umum dan TU)	Pandoyo
8.	Pangripto (Kepala Urusan Perencanaan)	Sefita Ayu Pramata Sari, S.Ikom

Sumber: Administrasi Pemerintah Kalurahan Donoharjo Tahun 2019.

Kemudian Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik, Sleman Yogyakarta Kabupaten, memiliki 16 Pedukuhan dan 79 RT Berikut adalah nama-nama Kepala Dukuh yang ada di Kalurahan Donoharjo:

Tabel II.8
Nama-nama Kepala Dukuh di Kelurahan Donoharjo

No	Jabatan	Nama
1	Dukuh Balong	Plt R.Fendi Aji Putra,S.H
2	Dukuh Wonosari	Sartini
3	Dukuh Kayunan	Hartono
4	Dukuh Ngepas Lor	Plt.Sigit krisnanto
5	Dukuh Ngepas Kidul	Sigit Krisnanto
6	Dukuh Jetis Suruh	Edi haryono, S.E.
7	Dukuh Suruh	R.Agus pranggoyono
8	Dukuh Brengosan	Sumarsono
9	Dukuh Gondang Lutung	Supriyanto
10	Dukuh Donolayan	Arif Irnawan
11	Dukuh Jetis Donolayan	Agung Karyono
12	Dukuh Bantarjo	Bangkit Arif Prayono
13	Dukuh Banteran	Catur Suharno
14	Dukuh Panasas	Suparyadi
15	Dukuh Ngeplak	Suharyadi
16	Dukuh Penen	Warsono, B.Sc.

Sumber: RPJMDes Tahun 2016-2022 Kalurah Donoharjo

G. Kondisi Masyarakat Kalurahan Donoharjo

1. Kondisi Sosial

Kalurahan Donoharjo adalah desa yang terletak di pedesaan, akan tetapi tidak terlalu pelosok. Masyarakat Kalurahan Donoharjo tergolong masyarakat yang sangat ramah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakat desa. Hal tersebut tidak lepas dari adat atau norma yang ditanamkan pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal akan keramah-tamahannya. Selama masa pandemi Covid-19

masyarakat Donoharjo tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga intensitas kehidupan sosial mereka menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ketua BPD Kelurahan Donoharjo pada tanggal 15 Januari 2021. Beliau menjelaskan bahwa banyak kegiatan sosial yang diberhentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari ulang tahun NKRI juga semuanya ditiadakan. Dari hasil observasi kegiatan-kegiatan keagamaan juga dibatasi misalnya jamaah sholat di masjid, kemudian jamaah gereja juga dibatasi. Terutama untuk masyarakat yang sudah lanjut usia. Di sisi lain peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa untuk kegiatan seperti tahlilan atau acara doa bersama masih dilakukan. Meskipun demikian, masyarakat Kalurahan Donoharjo tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi tidak semua masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Donoharjo pada umumnya sudah berjalan dengan lancar dengan kata lain roda perekonomian Desa Sumbermulyo cukup baik sebelum adanya pandemi Covid-19. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang seperti pedagang warung-warung kelontong, kemudian banyak juga yang bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik, buruh proyek, pegawai swasta dan lain-lain.

Banyak dari mereka yang terdampak akibat pandemi Covid-19 khususnya dari segi ekonomi. Ada yang mengalami gulung tikar, terkena PHK, kehilangan mata pencaharian, berkurangnya pendapatan dan sebagainya. Selain itu Kalurahan Donoharjo memiliki BUMDesa yang seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa kemudian mengalami penurunan pendapatan karena adanya pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19 sumber pendapatan BUMDes Kalurahan Donoharjo salah satunya dari menyewakan genset kepada masyarakat yang akan mengadakan hajatan dan semenjak pandemi karena tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan hajatan dalam bentuk apapun, sehingga BUMDes Kalurahan Donoharjo kehilangan salah satu sumber pendapatan.

Berdasarkan data penerima BLT-Desa baik tahap 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena pandemi Covid-19 ini. Sehingga Pemerintah Kalurahan Donoharjo melakukan *protecting* terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui sebuah kebijakan. Yang diwujudkan dalam Peraturan Lurah Kalurahan Donoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat Pandemi Covid-19 tahap 1-3 dan Peraturan Lurah Kalurahan Donoharjo 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat Pandemi Covid-19 tahap 4-6. Hal ini didukung oleh data jenis pekerjaan yang ada di Kalurahan Donoharjo.

Tabel II.9
Mata Pencaharian Penduduk di Kalurahan Donoharjo

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	103	68	171	2,04
2	Buruh tani	1,797	1495	3.292	39,22
3	Buruh pabrik	801	536	1.337	15,93
4	PNS	189	202	391	4,66
5	Pegawai swasta	840	633	1.473	17,55
6	Pedagang	678	770	1.448	17,25
7	TNI	35	0	35	0,41
8	POLRI	47	1	48	0,57
9	Dokter	3	6	9	0,11
10	Bidan	4	4	8	0,10
11	Perawat	4	20	24	0,28
12	Lainya	54	104	158	1,88
Total		4.555	3.839	15.885	100

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Donoharjo 2019

3. Kondisi Budaya

Di Kalurahan Donoharjo terdapat beberapa jenis kesenian daerah yang masih ada sampai sekarang. Kesenian jathilan merupakan kesenian asli daerah Donoharjo. Selain hal tersebut penduduk di Kalurahan Donoharjo banyak yang masih tertarik dengan kesenian jathilan sehingga sampai saat ini keberadaan kesenian jathilan masih exist. Selain itu, masyarakat juga masih mempertahankan adat seperti; masih menjalankan berbagai upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *life circle*, diantaranya adalah:

- a. Upacara Mitoni, yaitu selamat pada usia kehamilan mencapai genap tujuh bulan.
- b. Upacara puputan, yaitu upacara selamat pada saat tali pusar bayi sudah lepas/mengering.

- c. Jagongan, yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau begadang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam(satu minggu).
- d. Selapanan, yaitu acara kenduri atau Selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 (tiga puluh lima hari) sebagai ungkapan rasa syukur.
- e. Upacara kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, 40 hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
- f. Upacara khitanan, yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai menginjak aqil balig berangkat menjadi laki-laki dewasa
- g. Upacara pernikahan, dengan berbagai urutan pernak pernik tradisi Jawa, seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi. Akan tetapi setelah adanya pandemi banyak budaya rutin yang tidak dilaksanakan lagi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

4. Wisata Budaya

- a. Kesenian tradisional

Kalurahan Donoharjo juga menawarkan wisata kesenian tradisional, budaya, dan kerajinan atau home industri.satu lagi yang merupakan ciri khas Kalurahan Donoharjo adalah adanya rumah joglo yang diberih nama Joglo Tanjung. Konon rumah joglo yang kini berumur lebih dari 200 tahun ini dulunya milik lurah setempat. Joglo Tanjung mengalami 3 kali renovasi. Meski lantai tanah rumah joglo kini telah di renovasi menjadi lantai keramik, namun secara keseluruhan bagian dan ornament-onarment kuno yang ada masih terjaga dengan baik.

Beberapa bagian rumah joglo antara lain pendopo, pringgitan, ndalmen langkingan, pawon, garasi kereta dan kandang kuda yang saat ini berubah menjadi tempat penyimpanan gamelan. Kalurahan donoharjo memiliki areal persawahan yang cukup luas yang juga menjadi potensi kalurahan ini. pengujung dapat belajar dan turun langsung ke sawah untuk belajar bagaimana cara mengolah tanah, menama, memanen, sampai hasil panen tersebut tersaji di meja makan. potensi kesenian kalurahan diantaranya Jathilan, sholawaan, karawitan, Tari angguk putri, dan tari klasik. Untuk potensi kerajinan atau home industri yang bisa diikuti oleh pengujung antara lain pembuatan mainanan anak, proses memasak makanan tradisional, dan pembuatan batik. Sedangkan untuk upacara adat yang bisa di selenggarakan di desa antara lain, mantenan, sunatan, kenduri, dan wwid.

b. Embun Jetis Suruh

Pemerintahan Desa (Pemdes) Donoharjo Kapanewon Ngaglik, Sleman mengembangkan pariwisata ramah difabel. Tempatnya di embung Jetis Suruh. lokasi ini dapat sebagai alternatif pariwisata di kabupaten Sleman.

Embung ini dibangun 2014 lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP dan ESDM) Pemda DIY diatas lahan seluas, 1,3 hektar. Embung sendiri memiliki volume tampungnya 24 ribu meter³. Pengelolaan Embung di

serahkan pada Bumdesa. Hal yang membedakan Embung jetis suruh dengan embung lainnya terkait aksesibelnya. Penyediaan fasilitas khusus bagi disabilitas. Seperti jalan dan juga toilet umum yang bisadi akses dengan kursi roda, sehingga memudahkan untuk berjalan mengelilingi Embung. Inovasi ini menjadi respon positif dari pemerintah kabupaten (pemkab) Sleman. Embung ini diharapkan dapat menjadi wisata alternatif bagi wisatawan yang datang ke Sleman. Embung jetis suruh memiliki pemandangan yang masih asri dan sejuk cocok untuk keluarga yang ingin sekedar bersantai menikmati pemandangan embung. Embung Jetis Suruh juga mengadakan kegiatan Sunmor setiap hari minggu pagi. Sunmor ini biasanya ramai berisi pedagang dan banyak warga yang berolahraga seperti lari pagi dan sepedaan. Banyak juga warga yang menikmati keindahan embung dengan hanya berjalan mengelilingi embung. Selain sunmor juga ada senam sehat dan event setiap minggunya. Salin itu terdapat juga wisata edukasi dan bermain dengan kelinci di embung hetis suruh.

H. Keuangan Desa

Dalam kerangka konseptual telah disebutkan mengenai pengertian Dana Desa bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari pendapatan transfer.

1. APBDesa Kalurahan Donoharjo Tahun Anggaran 2019

Di bawah ini merupakan tabel rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Donoharjo tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut

Tabel II.10
Rencana dan Realisasi APBDesa Kalurahan Donoharjo Tahun Anggaran 2019

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Desa	406.708.050,00	406.708.050,00
a. Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00
1) Bagi Hasil BUMDesa	5.000.000,00	5.000.000,00
b. Hasil Aset Desa	401.708.050,00	401.708.050,00
1) Pengelolaan Tanah Kas Desa	364.208.050,00	364.208.050,00
2) Hasil Kios Milik Desa	17.500.000,00	17.500.000,00
3) Bangunan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00
4) Lain-lain Aset Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
2. Pendapatan Transfer	3.938.668.158,00	4.001.062.440,00
a. Dana Desa	1.365.559.000,00	1.365.559.000,00
1) Dana Desa	1.365.559.000,00	1.365.559.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	163.502.158,00	225.896.440,00
1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	163.502.158,00	225.896.440,00
c. Alokasi Dana Desa	1.604.607.000,00	1.604.607.000,00
1) Alokasi Dana Desa	1.604.607.000,00	1.604.607.000,00
d. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	805.000.000,00	805.000.000,00
1) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	805.000.000,00	805.000.000,00
3. Pendapatan Lain-lain	75.000.000,00	75.000.000,00
a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	14.000.000,00	14.000.000,00
1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	14.000.000,00	14.000.000,00
b. Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00

1) Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		51.000.000,00
1) Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	51.000.000,00	51.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.420.376.208,00	4.482.770.490,00
B. Belanja		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.769.477.020,00	1.763.294.055,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.721.870.040,00	1.729.225.500,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.058.364.500,00	1.062.234.500,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	317.049.000,00	318.771.500,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	40.800.000,00	48.419.282,00
JUMLAH BELANJA	4.907.560.560,00	4.921.944.837,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(487.184.352,00)	(439.174.347,00)
C. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	537.184.352,00	498.541.387,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	59.367.040,00
Pembiayaan Netto	487.184.352,00	439.174.347,00

Sumber: Peraturan Lurah Kalurahan Donoharjo Nomor 02 Tahun 2019

Berdasarkan tabel mengenai rincian singkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kalurahan Donoharjo merupakan desa dengan pendapatan yang cukup tinggi yaitu sebesar **Rp 4.482.770.490,00** di tahun 2019. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar **Rp 406.708.050,00**, pendapatan transfer termasuk Dana Desa sebesar **Rp 4.001.062.440,00** serta pendapatan lain-lain sebesar **Rp 75.000.000,00**. Meskipun demikian, Kalurahan Donoharjo mengalami defisit anggaran hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa perubahan anggaran sehingga mengalami defisit anggaran sebesar **Rp 439.174.347,00**. Selain itu, Kalurahan Donoharjo memiliki selisih penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan atau pembiayaan netto sebesar **Rp 439.174.347,00**. Dari penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pendapatan desa terbesar kedua yaitu pendapatan transfer khususnya Dana Desa sebesar **Rp 1.365.559.000,00**. Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu jumlah realisasi anggaran belanja untuk bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa semuanya mengalami penambahan anggaran. Kemudian untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak mengalami penambahan tetapi antara rencana dan realisasi jumlah anggarannya berkurang sebesar **Rp 6.182.965,00**. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa di tahun 2019 belum terdapat lonjakan anggaran maupun realisasi pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, meskipun sudah gempar terkait adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor industri. Hal itu terjadi karena pada tahun 2019 wabah Covid-19 belum ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO sehingga Pemerintah Pusat belum menerbitkan peraturan ataupun kebijakan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan mencegah penyebaran Covid-19. Dengan demikian Pemerintah Desa masih menganggarkan dan merealisasikan belanja desa sesuai dengan kebutuhan desa serta masyarakat desa.

2. APBDesa Kalurahan Donoharjo Tahun Anggaran 2020

Di bawah ini merupakan data rencana dan realisasi APBDesa Kalurahan Donoharjo setelah perubahan ketiga berdasarkan Peraturan

Lurah Kalurahan Donoharjo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Donoharjo Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.11
Rencana dan Realisasi APBDesa Kalurahan Donoharjo Tahun
Anggara 2020

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Desa	662.844.000,00	390.973.255,00
a. Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00
b. Hasil Aset Desa	657.844.000,00	385.973.255,00
2. Pendapatan Transfer	4.049.793.158,00	3.923.339.849,00
a. Dana Desa	1.586.684.000,00	1.575.877.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	163.502.158,00	190.316.849,00
c. Alokasi Dana Desa	1.604.607.000,00	1.462.146.000,00
b. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	695.000.000,00	695.000.000,00
1. Pendapatan Lain-lain	41.000.000,00	25.000.000,00
a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	30.000.000,00	14.000.000,00
b. Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00
a. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.000.000,00	1.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.753.637.158,00	4.339.313.104,00
B. Belanja		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.312.276.582,00	1.898.321.601,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.770.409.000,00	1.287.111.500,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	676.510.100,00	386.626.500,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	284.986.700,00	42.637.500,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	48.717.615,00	924.628.575,00
JUMLAH BELANJA	5.092.899.997,00	4.539.325.676,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(339.262.839,00)	(200.012.572,00)
C. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	394.262.839,00	230.012.572,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	30.000.000,00
Pembiayaan Netto	339.262.839,00	200.012.572,00

Sumber: Sistem Keuangan Kalurahan Donoharjo Tahun 2021

Berdasarkan tabel APBDesa Kalurahan Donoharjo tahun 2020 dapat diketahui bahwa pendapatan terbanyak bersumber dari Dana Desa yaitu Rp 1.575.877.000,00 yang kemudian diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp 924.628.575,00. Di tahun 2020 Kalurahan Donoharjo juga mengalami defisit anggaran sebesar Rp 200.012.572,00. Selanjutnya mengenai pengeluaran terbanyak di tahun 2020 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu sebesar Rp 1.898.321.601,00. Pada APBDesa 2020 ini juga telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali dan ini adalah yang paling terakhir. Selain itu, pada APBDesa tahun 2020 ini Pemerintah Kalurahan Donoharjo benar-benar banyak menghilangkan kegiatan atau program terutama di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan selisih antara rencana dan realisasi yang cukup banyak pada kedua bidang tersebut. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa selisih antara rencana dan realisasi sebesar Rp 413.954.981,00 serta pada bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp 483.297.500,00. Selain kedua bidang di atas, dua bidang yang lain juga mengalami selisih rencana dan realisasi yang cukup besar juga. Hal itu dapat dilihat dari rencana dan realisasi anggaran yang ada di mana pada bidang pembinaan kemasyarakatan tertulis rencana anggaran sebesar Rp 676.510.100,00 kemudian pada realisasinya berkurang sebesar Rp 289.883.600,00 sehingga realisasi anggaran pada bidang pembinaan kemasyarakatan hanya sebesar Rp 386.626.500,00. Kemudian di bidang pemberdayaan

masyarakat pada rencana anggaran tertulis anggaran sebesar Rp 284.986.700,00 yang kemudian realisasinya hanya sebesar Rp 48.850.000,00, berkurang sebesar Rp 242.349.200,00. Dan yang terakhir yaitu pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa juga memiliki selisih anggaran yang banyak antara rencana dan realisasinya tetapi berbeda dengan bidang lainnya, bahwa di tahun anggaran 2020 hanya di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp 875.910.960,00**. Dengan demikian, sudah terlihat jelas bahwa Pemerintah Desa telah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa yang awalnya diprioritaskan untuk 4 bidang kewenangan desa, di tahun 2020 penggunaan Dana Desa lebih diprioritaskan pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 yang berdampak di berbagai bidang kehidupan masyarakat mulai dari bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya.

3. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kalurahan Donoharjo

Dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk dari tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan DONoharjo.

Tabel II.12
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I Tahun
Anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Donoharjo
Pagu Dana Desa: Rp 1.575.877.000,00

Uraian	Penerimaan (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)	Sisa (Rupiah)
1. Pendapatan			
Dana Desa	1.265.024.400,00		
Penyaluran ke-1	634.673.600,00		
Penyaluran ke-2	236.381.550,00		
Penyaluran ke-3	236.381.550,00		
Penyaluran ke-4	157.587.700,00		
2. Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		2.472.500,00	
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif		1.325.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa		850.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya		297.500,00	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		381.823.500,00	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madr asah Non Formal		7.650.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana		5.000.000,00	
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi		14.963.000,00	
Penyelenggaraan Posyandu		24.287.500,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		4.186.000,00	
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		19.292.000,00	
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita		2.650.000,00	
Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu		1.517.500,00	

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan		98.798.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rumah Tidak Layak Huni		90.917.000,00	
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa		2.500.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum		96.000.000,00	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		1.012.500,00	
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		13.050.000,00	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		163.367.500,00	
Pembinaan di Bidang Keagamaan		6.500.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana		138.025.000,00	
Pembinaan PKK		18.842.500,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		15.137.500,00	
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier		2.100.000,00	
Pelatihan / Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian		10.747.500,00	
Pendataan Warga Difabel		2.290.000,00	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak		511.760.700,00	
Kegiatan Penanggulangan Bencana		101.360.700,00	
Penanganan Keadaan Mendesak		410.400.000,00	
3. Pembiayaan			
SILPA Tahun Sebelumnya	63.203.590,00		
SILPA Dana Desa	63.203.590,00		
JUMLAH	1.328.227.990,00	1.074.561.700,00	253.666.290,00

Sumber: Sistem Keuangan Kalurahan Donoharjo Tahun 2020

Berdasarkan data di atas mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun anggaran 2020 dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa di semester I sebesar **Rp 1.265.024.400,00** dibagi menjadi 4 kali penyaluran dengan besaran yang berbeda. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa tahun anggaran 2020 ini diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar **Rp 511.760.700,00** yang di dalamnya termasuk untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 sebesar **Rp 410.400.000,00**. Dengan rincian untuk 228 penerima BLT-Desa dengan total penerimaan setiap satu penerima yaitu **Rp 1.800.000,00**.

Kemudian sisa anggaran pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak selain untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, digunakan untuk belanja kegiatan penanggulangan bencana seperti pembelian alat-alat pelindung diri, pembelian sabun cuci tangan, pembelian desinfektan dan lain sebagainya yaitu sebesar **Rp 101.360.700,00**. Selain itu juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa telah merealokasikan penggunaan Dana Desa terutama di dua bidang kewenangan desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksanaan pembangunan di mana anggarannya digunakan untuk bidang penanggulangan bencana non alam yang sedang terjadi yaitu pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui penggunaan Dana Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada semester I yaitu hanya sebesar **Rp 2.472.500,00**. Kemudian penggunaan Dana Desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar **Rp 381.823.500,00**. Selanjutnya penggunaan Dana Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar **Rp 163.367.500,00** dan yang terakhir di bidang pemberdayaan masyarakat pada semester pertama yaitu sebesar **Rp 15.137.500,00**. Dengan demikian dari data diatas pemerintah Kalurahan Donoharjo telah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020, yang diprioritaskan untuk penyaluran BLT-Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berikut ini merupakan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Donoharjo.

Tabel II.13
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun
Anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Donoharjo
Pagu Dana Desa: Rp 1.575.877.000,00

Uraian	Penerimaan (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)	Sisa (Rupiah)
1. Pendapatan			
Dana Desa	1.265.024.400,00		
Penyaluran ke-1	634.673.600,00		
Penyaluran ke-2	236.381.550,00		
Penyaluran ke-3	236.381.550,00		
Penyaluran ke-4	157.587.700,00		
2. Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		2.472.500,00	

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif		1.325.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa		850.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya		297.500,00	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		381.823.500,00	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah Non Formal		7.650.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana		5.000.000,00	
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi		14.963.000,00	
Penyelenggaraan Posyandu		24.287.500,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		4.186.000,00	
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		19.292.000,00	
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita		2.650.000,00	
Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu		1.517.500,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan		98.798.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rumah Tidak Layak Huni		90.917.000,00	
Pemeliharaan Fasilitas		2.500.000,00	

Pengelolaan Sampah Desa			
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum		96.000.000,00	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		1.012.500,00	
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		13.050.000,00	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		163.367.500,00	
Pembinaan di Bidang Keagamaan		6.500.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana		138.025.000,00	
Pembinaan PKK		18.842.500,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		15.137.500,00	
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier		2.100.000,00	
Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian		10.747.500,00	
Pendataan Warga Difabel		2.290.000,00	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak		511.760.700,00	
Kegiatan Penanggulangan Bencana		101.360.700,00	
Penanganan Keadaan Mendesak		410.400.000,00	
3. Pembiayaan			
SILPA Tahun Sebelumnya	63.203.590,00		
SILPA Dana Desa	63.203.590,00		
JUMLAH	1.328.227.990,00	1.074.561.700,00	253.666.290,00

Sumber: Sistem Keuangan Kalurahan Donoharjo Tahun 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa di semester II ini bertambah menjadi 5 kali penyaluran dengan anggaran sebesar **Rp 1.575.877.000,00**. Dengan penyaluran ke lima sebesar **Rp 310.852.600,00**, dana tersebut kemudian dibagi ke dalam 5 bidang mulai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan besaran yang berbeda-beda. Pada semester II penggunaan Dana Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi **Rp 14.660.000,00**.

Kemudian penggunaan Dana Desa di bidang pelaksanaan pembangunan bertambah menjadi **Rp 542.558.600,00**. Selanjutnya untuk bidang pembinaan kemasyarakatan bertambah menjadi **Rp 174.647.500,00** dan penggunaan Dana Desa pada semester II bidang pemberdayaan masyarakat bertambah menjadi **Rp 39.181.500,00**. Penggunaan Dana Desa di tahun 2020 semester II masih diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat darurat dan mendesak dalam hal ini untuk penanganan bencana non alam yaitu pandemi Covid-19. Dana Desa yang digunakan untuk hal tersebut bertambah menjadi **Rp 854.969.710,00**, angka tersebut berasal dari total belanja di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa pada semester I dan semester II. Pada semester II ini, penggunaan Dana Desa di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa salah satunya digunakan untuk penyaluran BLT-Desa tahap 4, 5 dan 6 sebesar **Rp 317.700.000,00**, dengan rincian untuk 353 penerima BLT-Desa dengan

jumlah penerimaan setiap orang sebesar **Rp 900.000,00** yang dibagikan 1 bulan sekali selama 3 bulan dimulai pada bulan Agustus 2020. Serta untuk kegiatan penanggulangan bencana bertambah menjadi **Rp 128.669.710,00**. Program penyaluran BLT-Desa yang bersumber dari Dana Desa tersebut diharapkan mampu menstabilkan perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat mencapai kesejahteraan desa. Tetapi pada kenyataan di lapangan, program penyaluran BLT-Desa ini tidak efektif. Hal ini karena metode penyaluran BLT-Desa di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, Yogyakarta ini dilaksanakan secara tunai (*cash*), sehingga masyarakat desa yang menerima Bantuan Langsung Tunai Desa itu kebanyakan tidak untuk membeli kebutuhan pokok ataupun bahan makanan pokok tetapi untuk membelanjakan kebutuhan yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dengan adanya program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa untuk keluarga miskin dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

I. Penerimaan Bantuan Langsung Tunai

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 Dana Desa kemudian dipergunakan beberapa kebutuhan mendesak yaitu rumah karantina, Padat Karya Tunai Desa serta Bantuan Langsung Tunai Desa. Selanjutnya desa melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin yaitu keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima PKH, Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra kerja diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan atau mempunyai sakit menahun atau sakit kronis, balita dan lansia. Kemudian keluarga miskin di luar DTKS yang ditemukan di Desa dan belum terdata atau disebut dengan *exclusion error*.

Bantuan Langsung Tunai ini kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima BLT-Desa secara bertahap yaitu tahap 1,2 dan 3 sebesar Rp 600.000,00 per bulan terhitung mulai bulan April 2020 serta tahap 4,5 dan 6 sebesar Rp 300.000,00 per bulan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai “Budaya Berdesa Dalam membangun Kalurahan Donoharjo” maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai kebudayaan kearifan lokal misalnya, jatilan, nyadran, wiwit, ketoprak, dan lain-lain yang ada di Kalurahan Donoharjo untuk sementara masih berjalan dan untuk melestarikannya masyarakat menyelenggarakan setiap tahun dan hari-hari besar, misalnya acara pesta kalurahan dan lain-lain. Nilai kearifan lokal tentu sangat berperan besar dalam proses pembangunan kalurahan dimana, nilai tersebut bisa mengakomodasi dan mempersatukan sehingga menghasilkan keharmonisan dalam berdesa dan bermasyarakat. Tetapi tidak semua kearifan lokal tersebut dijalakan oleh masyarakat Donoharjo. Fakta yang terjadi dilapangan adalah pemerintahan kalurahan Donoharjo hanya sebagai fasilitator misalnya menyediakan gedung dan menyampaikan informasi terkait proses penyelenggaraan kegiatan tersebut, tetapi belum ada kebijakan misalnya terkait pendanaan, pendampingan, dan apresiasi terhadap pentasan budaya tersebut. Persoalan-persoalan ini seharusnya kalurahan Donoharjo bukan hanya sekedar sebagai fasilitator tetapi harus lebih dari pada itu,

salah satunya membuat kebijakan penganggaran terhadap proses penyelenggaraan kegiatan tersebut.

2. Budaya berdesa dalam perwujudan gotong-royong sebagai modal sosial, Sangat rendah, dan tidak semua masyarakat ikut terlibat. Untuk fasilitas Umum masyarakat ikut berpartisipasi seperti pembuatan talud, jalur irigasi dan jalan, dan itu hanya di setiap wilayah padukuhan, Untuk kalurahan masyarakat tidak ikut terlibat karena punya anggaran masing-masing. Berkaca pada apa yang disampaikan masyarakat bahwa, Gotong-royong sebagai modal sosial di kalurahan donoharjo semakin berkurang, dimana gotong-royong yang dihasilkan adalah gotong-royong uang, ada uang ada kerja, belum ada uang belum ada kerjaan. Hal ini berbeda jauh dengan semangat gotong-royong ala Sukarno dan UU Desa dimana, pembanting-tulangan bersama, pemeras keringat bersama bukan lagi sebagai modal sosial tetapi sebagai modal uang.
3. Budaya berdesa dan partisipasi dalam proses pembangunan di Kalurahan Donoharjo sangat baik. Keaktifan masyarakat dalam Musrembang, Musdes bahkan musdus sangat bagus kalau kita berkaca pada apa yang disampaikan oleh masyarakat di atas, walaupun mereka minim aktif dalam proses MUSKAL tetapi budaya berdesa sudah terbentuk dalam musyawarah RT,RW dan MUSDUS sudah terbentuk. Menjadi persoalan adalah partisipasi masyarakat lebih dominan di tingkat dusun, hal ini dikarenakan masih pandemi dan sebelum pandemi juga masyarakat di undang hanya perwakilan setiap padukuhan. Bagi penulis mengundang

perwakilan ini menyebabkan kerenggangan relasi antara kalurahan donoharjo dan masyarakat, problema tersebut tidak disadari pihak kalurahan. seharusnya pihak kalurahan, membangun komunikasi, membuat kebijakan, mengakomodir masyarakat, merangkul sehingga budaya partisipasi berjalan dengan baik. Salah satu kebijakannya adalah mengundang seluruh masyarakat bahkan elemen turut berpartisipasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa.

B. Saran

Hendaknya Dilakukan penelitian lebih lanjut terutama pada aspek-aspek yang belum terungkap misalnya terkait dengan keterlibatan faktor budaya berdesa dalam proses pembangunan di kalurahan dan apakah budaya tersebut bisa di terima oleh masyarakat. Mengungkapkan partisipasi masyarakat kenapa sangat rendah dalam proses pembangunan di desa. Dan bagaimana peran Pemerintahan Kalurahan Donoharjo dalam merawat Kearifan lokal dan mengakomodasi, merangkul dan mengikut sertakan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Baru Negara Lama*. Pascasarjana STPMD “APMD”: Yogyakarta.
- Maleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Oka, I Gusti Ngurah, 1974. *Problematika Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soemarjan dan Soelaeman Soenardi. 1964 “Setangkai bunga sosiologi. Penerbit FEUI: Jakarta
- Ahmadi, dkk. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Bhineka Cipta: Jakarta.
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*, Pustaka Jaya: Jakarta.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 2016. Buku Kepariwisata Kabupaten Karangasem Tentang Perolehan Pendapatan Asli Daerah Karangasem. Amlapura.

Jurnal :

- Herman 2009. *Bahasa Mempengaruhi Budaya? Tunggu Dulu*
<http://id.acehinstite.otg/index.php?option=com--content&view=arti>,
diunduh tanggal 2 Desember 2009
- Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2016. Revitalisasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan. Diunduh Pada 18 Agustus 2016 Dari <Http://Badanbahasa.Kemdikbud.Go.Id/Lamanbahasa/Artikel/1366>.
- Koentjaraningrat 1985. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Nuraini Asriati 2012. Mengembangkan Karakter Peserta Didik Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pembelajaran Di Sekolah. (Pendidikan IPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak).

- SK. Gubernur No. 325 Kpts/1995 Tanggal 24 November 1995 Bantukan Desa Budaya Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Desa-Desa Lain Yang Memenuhi Kriteria Sebagai Desa Budaya.
- Suyatno, S. (N.D). Revitalisasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan. Diakses Pada 1 Agustus 2016 Dari [Http://Badan Bahasa.Kemdikbud.Go.Id/Lamanbahasa/Artikel/1366](http://BadanBahasa.Kemdikbud.Go.Id/Lamanbahasa/Artikel/1366)
- Akhmar, A.M. Dan Syarifuddin. 2007. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*.
- PPLH Regional Sulawesi, Maluku Dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Dan Masagena Press, Makasar.
- Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat, Jurnal Filsafat Jilid 37, Nomor 2, 111 Diunduh 22 Agustus 2016 [Http://Dgi-Indonesia.Com/Wpcontent/Uploads/2009/02/Menggali Kearifan Lokal Nusantara](http://Dgi-Indonesia.Com/Wpcontent/Uploads/2009/02/Menggali Kearifan Lokal Nusantara).
- Hermaliza Essi, 2011. *Upacara Turun Sawah. Memaknai Upacara Turun Ke Sawa Pada Masyarakat Aceh*.
- Ernawati, Purwaningsi. “Kebo-Keboan Aset Budaya Di Kabupaten Bayuwangi.” Dalam Jatra Vol. 2. No. 4 Desember 2007. Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisi Yogyakarta.
- Eko, S. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press
- Eko, S. (2017) *Desa baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pasca Sarjana-STPMD—APMD.
- Eko, S. (2019). Kedudukan Keilmuan, Kelembagaan dan Kemakmuran. Pidato Kelembagaan Ketua Dalam Rangka Dies Ke-54 STPMD—APMD Yogyakarta, Dengan Tema: Maju dan Bermartabat.
- Eko, S. 2017 *Revolusi Mental Berdesa*.
- Ardika, I Wayan, 2004a. Kebudayaan Lokal, Multikultural, dan Politik Identitas dalam Refleksi hubungan Antaretnis antara Kearifan Lokal dengan Warga Cina di Bali. Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Fukuyama, Francis. 1999. *Benturan Antarperadaban*. Yogyakarta: Qalam.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing

Prasiasa, Putu Oka. 2011. *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Salemba Empat. Jakarta.

Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep, dan Aplikasinya*. Gava Media. Yogyakarta.

Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya*. Gava Media. Yogyakarta.

Peraturan perundangan :

Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.